

KEDAULATAN INDONESIA:

Analisis Historikal Politik

Sebagai bangsa yang pernah dijajah cukup lama oleh kekuatan asing, elite Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berhasil menyelenggarakan “pemindahan kekuasaan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Namun, peralihan dari posisi sebagai bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka membutuhkan perubahan “cara hidup” dan proses serta keberanian moral. Pemerintah sering menghadapi hambatan struktural dan kultural untuk merealisasi kedaulatan negara. Dan, banyak warga Indonesia yang belum biasa --dan memilih jalan-- hidup merdeka. Sering kemerdekaan dimaknai dengan kebebasan tanpa tanggungjawab. Konsekuensinya mereka belum dapat mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang berdaulat dan memposisikan bangsanya sebagai bangsa yang berdaulat.

Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia berusaha mengubah ekonomi colonial menjadi ekonomi nasional hingga kini juga belum berhasil. Kedaulatan ekonomi belum dapat diwujudkan. Kedaulatan politik dalam mengatur tata kelola kehidupan bernegara masih sering mendapat tekanan kekuatan asing. Mentalitas manusia yang memiliki otonomi diri bangsa Indonesia hingga kini juga masih lemah. Usaha para pendiri bangsa memberi contoh berani berpikir sendiri (*Sapere aude*) dan meninggalkan sikap inferioritas belum menjadi sikap dan perilaku dominan anak bangsa. Kedaulatan diri dan kedaulatan negara bangsa Indonesia hingga kini belum tumbuh kembang secara maksimal.

Untuk itulah saya akan mengawali narasi kehidupan kekinian sebagai bagian pengalaman keseharian. Realitas kedaulatan yang kekinian, yaitu pengalaman yang kini dan di sini merupakan produk sejarah. Kedaulatan pribadi warga negara Indonesia, kedaulatan bangsa dan negara yang masih memprihatinkan merupakan cermin dari perjalanan sejarah politik Indonesia.

Melalui penelusuran sejarah politik diharapkan diketahui asal usul kedaulatan diri manusia Indonesia dan posisi kedaulatan bangsa Indonesia. Termasuk relevansinya dengan tantangan dan kemungkinan realisasi kedaulatan bangsa kedepan menuju bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Kedaulatan diri manusia Indonesia dan kedaulatan negara tidak hanya produk dari relasi dan interaksi yang dialektis pelbagai elemen yang ada di Indonesia, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika perkembangan kekuatan politik, ekonomi dan budaya internasional.

Marilah kita melihat sejenak tentang kedaulatan diri dan kedaulatan bangsa dalam keseharian. Dalam kehidupan sehari-hari seolah semua kebutuhan yang ada sudah dimiliki oleh bangsa asing. Bangun pagi mendengar dering telpon genggam Nokia (MNC Finlandia), Black Berry (MNC Inggris) atau model lain buatan asing. Pada saat mandi menggunakan sabun Lux yang dimiliki MNC Unilever dari Belanda. Sikat gigi menggunakan Pepsodent milik *Unilever* atau “*Colgate*” milik MNC Amerika. Kemudian minum kopi susu Nescafe milik MNC Perancis. Diteruskan dengan sarapan pagi dengan “*nasi pecel*” makanan khas Indonesia dengan lauk tempe. Kita tidak tahu apa beras dan kedelainya diimpor dari negara lain. Mungkin nasinya diimpor dari

Thailand atau Vietnam sedang kedelainya dari Amerika atau Brasil. Tempe yang telah menjadi makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia juga tergantung pada bangsa asing (Wibowo, 2010a).

Setelah sarapan menghisap rokok Sampoerna (97% sahamnya milik Philip Morris, USA). Minum teh Sariwangi sahamnya dikuasai Unilever, Inggris atau sekedar minum air putih Aqua yang notabene 74% sahamnya dikuasai Danone (Perancis). Bahkan kecap ABC (HJ Heinz, USA) dan Bango (Unilever, Inggris) tidak lagi dikuasai bangsa sendiri. Berangkat kerja menggunakan sepatu Nike milik MNC Amerika, kendaraan Honda, Yamaha, atau Kijang produk MNC Jepang. Di tempat kerja bekerja dengan piranti lunak “Microsoft” atau “Intel” milik MNC Amerika. Ruang kerja kita menggunakan “Air Conditioner” (AC) yang juga produk bangsa asing.

Gedung dari rumah atau kantor kita yang kokoh dibangun dengan menggunakan semen yang juga dimiliki asing. Semen Tiga Roda buatan Indocement sebagian besar sahamnya (61,70%) milik perusahaan Heidelberg Jerman. Semen Gresik sudah dimiliki perusahaan Cemex Meksiko. Semen Cibinong sebagian besar sahamnya (77,37%) dikuasai oleh Holchim, Swiss (Alam, 2009). Siang harinya tatkala mau berbelanja, ternyata supermarket sudah banyak menjadi milik asing. Carrefour dan Alfa sebagian besar sahamnya dikuasai perusahaan Perancis. Giant atau Hero, sahamnya dikuasai oleh Dairy Farm Internasional, Malaysia.

Lalu mana yang menjadi milik bangsa Indonesia? Tempe yang sudah menjadi menu utama bangsa Indonesia juga tidak dikuasai oleh bangsa Indonesia. Bung Karno yang pernah menyatakan bahwa “kita bukan bangsa tempe” adalah suatu analog bahwa dalam proses membuat tempe. Bahan dasarnya, yaitu kedelai diinjak-injak. Kita jangan mau menjadi bangsa yang diinjak-injak oleh siapapun. Tidak berlebihan kalau terjadinya “krisis tempe” sebenarnya merupakan suatu “krisis kecerdasan”, “*krisis harga diri*”, dan “*krisis kebudayaan*”. Kita sebagai bangsa tidak mempunyai harga diri dan kecerdasan pangan dan membiarkan diri pribadi dan bangsa “diinjak-injak” oleh pasar dunia (Shindunata, 2008).

Kedaulatan diri dalam kehidupan sehari-hari cenderung larut dalam kehidupan satu dimensi yang seolah tidak dapat dielakkan. Kebutuhan dan keinginan sulit dibedakan. Seolah kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana dan siapa yang menghasilkan barang tersebut. Posisi sebagai warganegara sering dikalahkan dengan posisi sebagai konsumen. Akibatnya mayoritas warga kesulitan menunda kesenangan untuk meraih kemenangan dengan menjalani “laku hidup” yang berseberangan dengan nilai-nilai luhur warisan leluhur.

Gaya hidup transnasional seolah tiada relevansinya dengan kedaulatan diri, bangsa dan negara. Kita secara kolektif telah terkungkung oleh imanensi budaya. Kita sering tidak menyadari sudah didominasi kesadaran palsu. Kita tidak sempat memikirkan adanya kekuatan tertentu yang telah menyusup pada hampir setiap aspek kehidupan. Tidak terasa bahwa sebagai pribadi maupun sebagai bangsa kita tidak mampu mandiri atau berdaulat.

Dalam bercakap dan berwacana masyarakat, khususnya kalangan elit sering menggunakan bahasa dan kosakata asing. Bahasa Indonesia yang baik dan benar sering diabaikan. Posisi bahasa Indonesia yang sejak jaman pergerakan diperjuangkan sebagai bahasa persatuan sekaligus menjadi identitas bangsa sebagai bahasa nasional

makin kurang berwibawa dan membanggakan. Tidak berlebihan kalau pakar bahasa Indonesia dari Swedia, Andre Moller, heran dengan proses jual beli yang tidak menggunakan kata “tunai” atau “angsur” melainkan lebih suka menggunakan istilah “cash” atau “credit”? (Kompas, 4 Desember, 2006). Di kota-kota besar istilah “busway” lebih akrab disbanding jalur bus.

Kita memang belum berdaulat dalam berbahasa dan berwacana. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam percakapan formal pun sering tidak disiplin. Kepercayaan diri menggunakan bahasa nasional sejak dalam pergaulan sehari-hari, aktivitas formal hingga mengembangkan wacana akademis makin terasa berkurang. Banyak sekolah yang membanggakan keunggulannya dengan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantarnya. Ironisnya, banyak perguruan tinggi ikut berlomba menggunakan logo, “sesanti lembaga” (*brand name*) bahasa asing. Lalu siapa yang akan menjadi pelopor dan teladan dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik, benar dan cerdas? UU no 24 tahun 1999 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan telah dilanggar. Ironisnya, para pembuat dan penegak hukum kurang mempedulikan termasuk para pakar bahasa Indonesia.

Dalam tataran kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih luas kondisinya lebih memprihatinkan. Kita menyaksikan bahwa aset perbankan, pertambangan, energy, informasi hingga ritel banyak yang dikuasai oleh perusahaan asing. Berdasarkan PP no 29 tahun 1999 kepemilikan asing di dunia perbankan Indonesia diperbolehkan sampai 99%. Sebagai perbandingan rata-rata kepemilikan asing di sektor perbankan di Negara ASEAN hanya sekitar 33%. Kini banyak layanan bank asing yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Kepemilikan asing dalam dunia perbankan sampai Maret 2011 sudah mencapai 50, 6%. Sementara pihak perbankan Indonesia untuk mendirikan kantor cabang di negara lain, terutama Amerika dan Singapura prosedurnya sangat sulit dan berbelit (Kompas, 24 Mei 2011). (Ekonomi Didominasi Asing, Kompas, 23 Mei 2011)

Eksplorasi perkebunan dan pertambangan di wilayah Indonesia lebih banyak memberi peningkatan pendapatan orang asing dibanding pendapatan orang dan atau negara Indonesia. Kondisi pertambangan di Indonesia dari segi kepemilikan sudah sangat rawan. Pertambangan yang dikelola oleh asing sudah mencapai 75% (Kompas, 23 Mei 2011).

Berlimpahnya kekayaan alam Indonesia lebih banyak memberi kesejahteraan pihak asing. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada masih kurang meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. (Tambang Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa NTB, Kompas, 15 Juli 2011) Dalam pengelolaan industry strategis semacam IPTN, PAL, PINDAD, KAI, Krakatau Steels, Indosat, Garuda dan yang lain pemerintah Indonesia tak berdaya mengelak dari desakan dan paksaan kekuatan ekonomi politik internasional. Dalam mengelola air sebagai sumber kehidupan yang mendasar pemerintah memberi ruang bagi swasta asing untuk terlibat berdasarkan UU no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Seolah wajar perusahaan raksasa “Thames” (Inggris) dan “Lyonnaise” (Perancis) dapat “berpartisipasi” dalam mengelola PDAM di Jakarta dan Surabaya, termasuk menentukan tariff yang harus dibayar pelanggannya. (Aturan Porsi Asing)

Lalu apakah layak kita menyatakan diri sebagai pribadi yang berdaulat sementara pola pikir dan gaya hidup kita konsumtif dan hedonis? Sebagai pribadi kita kesulitan

membedakan antara aspek kebutuhan dengan aspek keinginan. Istilah “manusia yang berdimensi tunggal” yang pernah dilontarkan oleh Herbert Marcuse dapat menjadi salah satu perspektif dalam melihat kondisi masyarakat Indonesia.

Otonomi diri sebagai pribadi sering terdesak oleh kekuatan di luar diri kita. Seolah dalam kehidupan pribadi tidak memiliki kesempatan untuk memilih. Kita lupa bahwa kebebasan lebih ditentukan oleh kemampuan untuk menetapkan sendiri tujuan hidup serta jalan untuk mencapainya dengan mengambil keputusan diantara pelbagai alternative yang mampu kita pikirkan. Akibatnya banyak orang yang memilih lari dari kebebasan. Mereka mengorbankan kedaulatan diri karena kebebasan menuntut tanggungjawab. Sering menuntut para pemimpin untuk menegakkan kedaulatan bangsa, tapi kedaulatan dirinya tidak pernah ditegakkan. Mereka tidak mampu melakukan “refleksi ganda” yaitu kritis terhadap sesuatu di luar dirinya, tetapi juga berani kritis dan konsisten terhadap dirinya sendiri.

Dalam tataran berbangsa dan bernegara kedaulatan di bidang ekonomi, budaya dan politik masih sangat lemah. Pemerintah terlalu “santun dan lemah“ dalam berdiplomasi dengan bangsa asing. Kekuatan politik dan ekonomi asing cenderung diutamakan. Dampaknya kepentingan politik ekonomi nasional dirugikan. Kepekaan terhadap masalah yang serius dihadapi masyarakat secara kolektif cukup lemah. Tidak berlebihan bila beberapa pakar menyebut Indonesia sebagai “negara lunak” (soft state). Pemerintah dan warganya tidak memiliki ketegaran moral yang jelas, khususnya moral social-politik (Madjid, 2004; 112-2). Kita perlu merenung apakah kita sudah layak disebut sebagai pribadi dan bangsa yang berdaulat?

Barangkali metafor yang dikemukakan oleh Peter Senge dalam bukunya “*The Fifth Discipline; The Art & Practice of the Learning Organization*” (2006; 22-23) tentang “*katak rebus*” dapat menggambarkan kedaulatan bangsa Indonesia. Menurutnya, katak yang dimasukkan ke dalam air panas akan memberi reaksi cepat. Katak akan langsung berusaha meloncat keluar dari panci. Sebaliknya katak yang dimasukkan ke dalam air dingin yang berisi air dingin cenderung biasa dan tidak berusaha melompat. Sebaliknya reaksi yang berbeda pada katak yang dimasukkan pada air yang dingin. Saat air dipanasi secara perlahan, katak merasa menikmatinya. Katak merasa bereaksi setelah suhu air sekitar 70-80 derajat Fahrenheit. Pada saat katak sadar bahaya yang mengancam dirinya sudah terlambat. Energi katak sudah habis. Katak tidak mampu melompat keluar dari air yang panas. Perubahan sikap katak mengindikasikan bahwa sensor tubuh akan lebih mudah menangkap ancaman dari luar yang besar dan mendadak. Sensor tubuh kurang peka dengan ancaman yang berlangsung secara perlahan. Konsekuensinya ancaman yang perlahan baru disadari pada saat ancaman sudah parah. Deteksi dini tubuh terlambat mengantisipasi ancaman. Kita memang bukan katak. Kita adalah manusia. Dan sebagai manusia yang lahir dan besar di Indonesia kita menjadi warga negara Indonesia. Ancaman kekuatan asing yang secara perlahan dan kini bersifat masif terhadap kedaulatan diri dan bangsa cenderung dinikmati dan tidak disadari sebagai suatu ancaman. Penetrasi asing dalam bidang politik, ekonomi dan budaya yang dapat melemahkan kepekaan dan daya ketahanan kita secara perlahan disikapi seperti katak.

Untuk itulah pengalaman dan peristiwa keseharian yang selama ini cenderung dianggap biasa dan proses yang alami perlu dipertanyakan. Sejarah dapat membuat orang bijaksana melalui kepekaan terhadap masalah. Dari hasil renungan penulis, apa

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari cukup memprihatinkan bagi pengembangan kedaulatan diri maupun kedaulatan bangsa dan negara. Tanpa ada upaya yang serius menjaga kedaulatan diri dan bangsa, kita akan menjadi bangsa yang terjajah secara mental, budaya, ekonomi dan politik. Ironisnya kesadaran sejarah bangsa Indonesia sangat memprihatinkan.

Ketidakmampuan kita sebagai pribadi dan bangsa berdiri tegak sejajar dengan bangsa lain perlu menjadi wacana publik. Kontaminasi kehidupan yang mengancam kedaulatan diri dan negeri telah menjalar pada pelbagai aspek kehidupan. Kita telah kehilangan jati diri, harga diri dan kepercayaan diri, termasuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Prestasi dan reputasi bangsa Indonesia belum berkembang secara maksimal. Relasi yang seimbang dan adil dalam berinteraksi dengan bangsa lain masih sulit diwujudkan.

Tujuan pendiri bangsa berjuang mendirikan negara adalah untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dalam pelbagai bidang. Hanya dengan posisi bangsa dan negara yang berdaulat rakyat Indonesia sebagai warga negara dapat memperoleh perlindungan keamanan dan kesejahteraan secara beradab dan bermartabat. Kedaulatan negara juga membawa konsekuensi untuk merealisasi kedaulatan warganya. Para pendiri bangsa memperjuangkan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain. Namun hingga kini, masih ada warga Indonesia yang terlalu kagum dan rela "*membayar lebih*" bila berhadapan dengan asing. Mentalitas "*Inlanders*" tinggalan masa kolonial, masih cukup kuat berakar. Sejak era Orde Baru yang secara terus menerus mencari penopang asing -- dengan menggunakan bahasa lunak, yaitu "menarik investasi asing"-- memunculkan sikap "permisif" sehingga tidak kritis terhadap asing.

Menurut Budi Darma (Kompas, 30 Juni 2011), kini kita telah kehilangan martabat sebagai bangsa yang berdaulat. Konsultan, pilot, pendidik atau manager yang kualitasnya tidak lebih baik dari anak-anak Indonesia diberi gaji dan fasilitas yang jauh lebih besar. Menurut Ikrar Nusa Bakti, (Kompas, 20 Agustus 2010) pemerintah juga menerima begitu saja permintaan Australia agar Indonesia menjadi "Pusat Pencegahan" (*detention center*) yaitu bersedia menjadi pengawas, pemroses dan penghadang suaka illegal yang akan masuk Australia. Pemerintah tidak bisa belajar dari kasus "*Galang*" yang menerima "*manusia perahu*" di era Orde Baru. Timor Leste negara kecil dan baru merdeka saja berani menolak permintaan Australia, kenapa pemerintah RI tidak berani menolak? Kita telah "mengkhianati" mimpi dan perjuangan para pendiri bangsa yang berharap Indonesia dapat berdaulat, berdiri tegak sejajar dengan bangsa lain.

Tanpa negara yang berdaulat rakyat Indonesia sulit merealisasi kedaulatan diri secara maksimal dan bermartabat. Sebaliknya negara yang berdaulat tanpa memberi ruang kedaulatan diri rakyatnya akan menjadi praktek kekuasaan yang otoritarian. Para pendiri bangsa dengan cerdas telah merumuskan bahwa perjuangan mencapai kedaulatan politik dari penjajahan merupakan sarana, suatu jembatan emas untuk membangun dan memfasilitasi kesejahteraan dan keamanan rakyat tanpa harus mengorbankan kedaulatan dirinya. Untuk itulah sejak awal para pendiri bangsa telah menetapkan bentuk Negara yang dipilih adalah republik bukan monarki. Kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Kita menganut negara hukum agar keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan aspirasi rakyat.

Makna Kedaulatan

Sampai saat ini konsep dan realisasi kedaulatan diri dan bangsa sering menimbulkan perbedaan dan kontroversi dalam pemaknaan serta realisasinya. Secara konsep, kedaulatan (*sovereignty*) baru muncul pada pertengahan abad XVII. Konsep ini dikembangkan oleh filsuf Perancis, Jean Bodin (1530 – 1596). Dalam bukunya yang berjudul “*Six Books of a Commonwealth*” (1576) Bodin menjelaskan teori kedaulatan. Kedaulatan dimaknai sebagai suatu hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak terbatas dan tak tergantung. Konsep ini sebagai reaksi dari timbulnya konflik klaim kekuasaan antara golongan agama dan negara. (Sills, 1968). Menurutnya negara tanpa diberi kewenangan yang tinggi (kedaulatan) akan kesulitan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya yang terkait dengan perang saudara.

Dalam negara modern pengertian kedaulatan tidak lagi bersifat mutlak. Namun secara umum kedaulatan suatu negara memberi prinsip kekebalan dalam mengatasi masalah negaranya, melalui prinsip kekebalan (*principle of impermeability*). Dalam prinsip kekebalan, wilayah suatu negara tidak boleh dimasuki dalam bentuk apapun oleh negara atau warga lain. Walaupun negara memiliki kedaulatan tidak berarti negara dapat melakukan apa saja. Dalam menjalankan kedaulatan di dalam negerinya, negara dituntut adanya legitimasi etis dan sosial. Konsekuensinya dalam negara modern negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Keluar negara juga harus memperhatikan hak Negara lain dan organisasi-organisasi internasional (Suseno, 2004).

Makna “kedaulatan” dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai suatu istilah yang lazim digunakan untuk menjelaskan pengertian kekuasaan yang tertinggi, khususnya kekuasaan dalam suatu negara. Dalam hukum tata negara kedaulatan Tuhan (theokrasi) dibedakan dengan kedaulatan rakyat (demokrasi).

Bangsa Indonesia secara umum telah sepakat menganut kedaulatan rakyat. Maksudnya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat karena asal kekuasaan berasal dari rakyat. Sebagai konsekuensinya segala kebijakan pemerintah harus berlandaskan kemauan rakyat (Nugroho, 2004). Pemerintah dalam menjalankan tugasnya berkewajiban menjaga kedaulatan negara sekaligus memfasilitasi berkembang-tumbuhnya kedaulatan diri warga negara Indonesia secara maksimal.

Para pendiri bangsa berjuang tidak hanya berusaha memperoleh kedaulatan Negara sebagai negara yang merdeka. Mereka justru sudah berani merealisasi dirinya sebagai pribadi-pribadi yang berdaulat sebelum bangsanya memperoleh kedaulatan. Kedaulatan negara akan digunakan untuk membangun pribadi warga negara yang berdaulat agar warisan mental kolonial dapat segera ditinggalkan. Kedaulatan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa tidak dipertentangkan antara kedaulatan diri dengan kedaulatan negara. Keduanya justru dijadikan sebagai dua sisi yang saling ada dan menguatkan. Walaupun begitu kini di masyarakat makna kedaulatan masih sering menimbulkan tafsir yang beragam. Sebagian pihak menyatakan bahwa kita sebagai bangsa sudah berdaulat secara penuh sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Di satu sisi masih banyak pihak yang memaknai kedaulatan secara lebih luas. Memang kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, namun kondisi politik, ekonomi dan budaya bangsa Indonesia masih belum berdaulat.

Salah satu kontroversi dalam memaknai kedaulatan muncul dari tulisan kepala Badan Penanaman Modal Indonesia Gita (Kompas, 7 Oktober 2010) yang dalam peombakan (resuffle) kabinet SBY jilid II mendapat kepercayaan sebagai menteri perdagangan. Menurutnya nasionalisme ekonomi yang memfokuskan pada kepemilikan suatu investasi adalah suatu pengertian dan pengejawantahan yang kurang tepat. Nasionalisme ekonomi yang tepat adalah yang menempatkan investasi tersebut bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Menurutnya bisnis yang bersifat padat modal membutuhkan dana milaran dollas AS per tahun. Suatu kewajaran kalau modal yang besar diambil dari asing dengan memberikan stimulan tertentu.

Sebenarnya substansi dari pernyataan pejabat negara tersebut pada tahun 2006 telah menjadi “keprihatinan” kalangan sejarawan, salah satunya adalah Bambang Purwanto (2006; 158). Indonesia sebagai sebuah negara dan identitas kebangsaan seolah dianggap tidak relevan lagi karena yang paling penting adalah “*keuntungan ekonomis*”. Dominasi perusahaan asing tidak perlu dipermasalahkan karena dianggap telah mampu memberi layanan yang baik pada pemerintah dan rakyat Indonesia.

Pendapat Gita Wiryawan kemudian ditanggapi oleh Sony Keraf, Kwik Kian Gie (Kompas, 10 Oktober 2010) dan Sayidiman Surjomihardjo (Kompas, 12 Oktober 2010) serta Edi Swasono (Kompas, 15 Oktober 2010). Mereka beranggapan bahwa nasionalisme yang dikemukakan oleh Gita Wiryawan tidak hanya bertentangan dengan misi sejarah nasionalisme Indonesia, melainkan juga tidak sesuai dengan ideologi dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Namun, praktek politik ekonomi di Indonesia yang terjadi justru membenarkan konsep dan pengertian nasionalisme ala Gita Wiryawan yang sejalur dengan prinsip dan pandangan neoliberalisme. Buktinya yang bersangkutan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian diangkat menjadi menteri perekonomian.

Memang sejak reformasi posisi negara di Indonesia memang makin lemah. Negara tidak lagi dianggap sebagai lembaga yang layak ikut campur tangan dalam masalah ekonomi, termasuk ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Konstitusi yang berlaku, yaitu “UUD 1945 yang sudah diamandemen” tidak mampu memberikan perlindungan kedaulatan material bagi bangsa Indonesia. Program “liberalisasi”, “restrukturisasi” dan “privatisasi” telah menempatkan badan usaha milik negara sebagai parasit. Kesalahan managerial perlu diganti dengan kepemilikan. Pencurian terhadap hasil bumi dan laut Indonesia dibiarkan merajalela.

Banyak pihak yang prihatin dengan kondisi kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia. Banyak tulisan (buku, artikel) yang ditulis tentang pentingnya memperkokoh kedaulatan. Mereka prihatin dengan makin lemahnya kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia. Kedaulatan atas wilayah Indonesia dengan segala isinya perlu dimanfaatkan bagi kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Bagi mereka yang berada di luar kekuasaan dengan mudah menyatakan bahwa neoliberalisme, kekuatan kapitalis global telah mencengkeram bangsa Indonesia. Indonesia telah menjadi negara gagal. Mereka mengusulkan akan perlunya kepemimpinan yang lebih tegas dalam memihak kepentingan bangsa dan negara. Pemimpin yang permisif terhadap desakan kekuatan politik-ekonomi global dianggap telah mengorbankan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Mereka yang berada di luar kekuasaan cenderung lantang untuk menegakkan kedaulatan bangsa secara radikal dan revolusioner.

Mereka mengkritik program diplomasi yang dilakukan pemerintah. Harapan para pendiri bangsa agar kita dapat menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan dengan segala bentuknya kini seolah hilang dari wacana keseharian. Kita sebagai warga negara telah tergeser oleh posisi kita sebagai konsumen yang mudah larut mengagumi pelbagai produk asing. Salah satu sarana untuk memahami sekaligus mencari solusi bagi perubahan yang lebih baik adalah menjelaskannya dari sejarah politik. Memang, politik bukan segala-galanya. Namun tanpa melibatkan dimensi politik segalanya sulit dipahami secara utuh karena kekuasaan telah merembes dalam segala dimensi kehidupan (*power is omnipresent*).

Berangkat dari keprihatinan itulah, Bab ini mengambil tema “*kedaulatan bangsa dalam perjalanan sejarah politik*”. Topik ini dipilih dengan memperhatikan beberapa pertimbangan. Pertama, topik tersebut merupakan bagian dari sejarah politik.

Kedua, penulis ingin mengajak rekan-rekan sejarawan dan ilmuwan social maupun publik untuk merenungkan kembali makna politik pada umumnya dan sejarah politik pada khususnya dalam memberikan pencerahan. Sejarawan yang menulis sejarah politik khususnya aspek kedaulatan bangsa Indonesia di era kontemporer masih sangat terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari makna politik telah mengalami “*reduksifikasi*” yaitu proses pendangkalan. Politik diidentikkan dengan “*akal-akalan*”. Politik dipenuhi oleh permainan kotor. Padahal makna politik sejak zaman Aristoteles dan tokoh-tokoh pergerakan nasional sekaligus pendiri bangsa sudah dimaknai sebagai proses “*saintifikasi*”. Politik yang mengalami “*saintifikasi*” selalu mengedepankan rasionalitas, strategi, kecerdasan dan kedalaman refleksi untuk membangun kebajikan (Riyanto, 2011).

Ketiga, mengajak para sejarawan dan peminat sejarah untuk memaknai sejarah kehidupan sehari-hari maupun akademis makna tersebut justru makin meredup. sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial yang bersifat profetik dan kritis -emansipatoris. Sejarah sebagai ilmu yang bersifat diakronis, yang lebih fokus pada dimensi proses dapat berperan menjelaskan pergeseran konsep dan praksis kedaulatan sejarah Indonesia kontemporer. Di samping itu sejarah juga dapat memberikan sumbangsih bagi pendekatan realitas kini yang sinkronis sekaligus pencerahan untuk masa depan sebagai ilmu yang bersifat profetik dan transformatif. Sebagai ilmu profetik –konsep yang dikembangkan dari filsof sosial dan ekonomi Amerika Kenneth Boulding--, ilmu sejarah “*tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial tapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa*”. (Kuntowijoyo, 1991; 288).

Sifat emansipatoris menempatkan sejarah menjadi bagian dari ilmu-ilmu social kritis. Posisi ini memungkinkan ilmu sejarah menjadi salah satu media dan kekuatan reflektif yang dapat membebaskan manusia dari kesadaran palsu akibat distorsi yang sistemik (Habermas, 1984). Dari filsafat sejarah, sejarawan tidak hanya dapat melakukan renungan dan pertanyaan tentang praduga ilmiah dan kecenderungan metodologi yang dipakai. Wawasan filosofis juga dapat menjaga fitrahnya sebagai sejarawan yang otentik dan kreatif. Sejarawan bukan sekedar tukang yang hanya bergelut dengan masalah teknis. Sejarawan adalah sosok ilmuwan yang memiliki tanggungjawab sebagai cendekiawan. Sejarawan dapat mengangkat relevansi suatu masalah dengan berangkat dari keprihatinan kecendikiaan dan kepekaan terhadap aktualitas yang terkait dengan lingkungan, masyarakat dan bangsanya. (Abdullah, 1985; xxiii)

Keempat, ada kecenderungan elit politik memaknai kedaulatan secara sempit. Kedaulatan bangsa dan negara tidak dikaitkan dengan kepentingan bangsa dan masyarakat kebanyakan. Kepentingan nasional seolah ada dalam wacana tetapi hilang dari tindakan dan kebijakan. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia hampir setiap ada pergantian pemimpin cenderung terjadi perubahan dalam memaknai dan merealisasi kedaulatan. Seolah dalam setiap pergantian kekuasaan, penguasa baru dalam merealisasi kedaulatan tanpa ada titik tolak dan tolok ukur yang telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa. Banyak elit di Indonesia yang menjauh dan atau memisahkan diri dari masyarakat sehingga kehilangan kepekaan sosial. Elit cenderung membangun tradisinya sendiri yaitu tradisi besar untuk membedakan dengan tradisi rakyat, tradisi kecil. Gaya hidup elit yang selalu menuntut fasilitas di tengah masyarakat kebanyakan yang banyak kesulitan hidup mengindikasikan hal tersebut. Mereka abai dengan misi kepemimpinan politik yang telah dirintis para pendiri bangsa. Mudah menuntut fasilitas yang tinggi namun rendah dalam dedikasi dan miskin dalam prestasi. Konsekuensinya, mereka mudah mengorbankan kedaulatan negara, kedaulatan rakyat hanya sekedar untuk memenuhi selera yang konsumtif dan hedonis.

Kelima, kedaulatan yang secara formal telah direbut melalui proklamasi 17 Agustus 1945 dan revolusi nasional belum berhasil mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, cerdas, adil, bermartabat dan sejahtera. Pada era reformasi yang sekarang sedang berjalan terkesan kedaulatan bangsa Indonesia dalam pelbagai aspek kehidupan makin memprihatinkan. Kegagalan terhadap nasib bangsa telah mendorong komitmen pada elit di beberapa lembaga negara. MPR telah memelopori untuk mengajak semua elemen bangsa merealisasikan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila yang sempat terabaikan perlu dikembalikan pada posisinya sebagai dasar negara, pandangan hidup sekaligus pemersatu bangsa agar dapat menjadi titik tolak sekaligus tolok ukur dalam merealisasikan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia secara bermartabat.

Repositioning Peran Sejarah Politik

Pelbagai permasalahan diatas sebenarnya merupakan bagian dari dinamika sejarah politik Indonesia yang memerlukan kajian serius dan terus menerus. Walaupun sejarah politik merupakan bidang yang paling tua dalam ilmu sejarah, perkembangannya dalam ilmu sejarah, khususnya di Indonesia belum menggembirakan. Banyak sejarawan Indonesia yang cenderung menghindari sejarah politik. Mereka lebih bangga disebut sejarawan sosial-ekonomi, maritim, perkotaan atau yang lain. Sejarah politik di Indonesia sejak era tahun 1970-an telah kehilangan daya tarik. Konsekuensinya sejarah politik belum berhasil memberikan pencerahan dan pengayaan moral dalam dinamika politik Indonesia kontemporer.

Padahal dalam sejarah penulisan sejarah, sejarah politik merupakan sejarah yang paling awal berkembang. Historiografi klasik selalu sarat dengan sejarah politik. Kisah sejarah yang ditulis oleh bapak sejarah, Herodotus (484 -425 SM) tentang “Perang Persia”, maupun kisah sejarah yang ditulis oleh Thucydides (456-396) tentang “Perang Peloponesia” merupakan sejarah politik. Demikian pula historiografi tradisional di nusantara, misalnya; babad, silsilah, tambo yang ada di nusantara merupakan “sejarah politik”. Pelbagai peristiwa sejarah raja, kerajaan dan orang besar dalam bergelut dengan kekuasaan diulas sesuai dengan wacana zamannya.

Sampai dengan awal abad XX sejarah politik cukup mendominasi pemikiran dan penulisan sejarah. Politik menjadi tulang punggung sejarah (politics is the backbone of history). Menurut sejarawan Inggris, Sir John Robert Seeley (1834-1895) “sejarah adalah politik masa lampau dan politik adalah sejarah masa sekarang”. Keterkaitan antara sejarah dan politik menyebabkan dominasi sejarah politik dalam historiografi menjadi suatu kewajiban (Kuntowijoyo, 2003; 174-175). Pada masa pergerakan nasional sejarah politik dimanfaatkan sebagai wacana perjuangan untuk mencapai kedaulatan bangsa.

Memang dalam sejarah politik “konvensional” topik yang dibahas cenderung berfokus pada masalah negara, kerajaan, militer dan orang-orang besar. Sejarah politiknya mendeskripsikan dan mengkaji masalah negara dan pemerintahan. Konsekuensi dari hal tersebut menempatkan sejarah politik lebih menampilkan elit sebagai tokoh utama dalam panggung sejarah. Sejarah seolah hanya menjadi milik orang-orang besar.

Fokus kajian sejarah politik konvensional yang mengkaji kekuasaan sebatas yang terkait dengan negara, militer dan orang-orang besar terbelenggu dalam pemaknaan politik secara sempit. Padahal di era masa klasik, ilmu politik sudah dimaknai secara luas dan mendalam. Menurut Aristoteles, apa yang disebut dengan istilah “*zoon politikon*”, “political animal” adalah makhluk sosial, yaitu manusia yang terlibat aktif dalam urusan polis. (Elton, 1970) Bagi Aristoteles ilmu politik merupakan “*architectonica*”, yaitu ilmu yang mengandalkan keanekaragaman teknik. Seorang politisi dituntut memiliki kemampuan diatas rata-rata. Politikus diandaikan sebagai pribadi yang tidak hanya cakap dalam teknik kehidupan biasa, melainkan juga mengerti dan memahami etika, ilmu sosial, kebijakan publik, nilai-nilai budaya dan filsafat bangsa. Konsekuensi dari hal tersebut sejarah politik mengkaji pelbagai aspek “kekuasaan” dan kehidupan yang terkait dengan pelbagai bidang kehidupan manusia.

Ironisnya, sejarah politik konvensional cenderung terperangkap dalam sejarah lorong. Sejarah yang secara linier cenderung membahas kekuasaan tanpa banyak dikaitkan dengan aspek sosial, ekonomi dan budaya. Seiring dengan perkembangan metodologi dan orientasi ilmu sejarah yang makin meluas, variatif serta multidimensi menyebabkan sejarah politik cenderung diberi makna pejoratif, negatif. Sejarah politik dianggap ketinggalan jaman. Sejarah politik dianggap tidak memihak rakyat kebanyakan dan cenderung diinterpretasikan sebagai ilmu yang berdimensi tunggal.

Dipelopori oleh Sartono Kartodirdjo, Taufik Abdullah, Kuntowijoyo dan Onghokham wacana dan penulisan sejarah sosial ekonomi di Indonesia menggeser orientasi kajian sejarah politik. Sejarah politik kemudian kehilangan daya tarik dan makin surut kebelakang. Daya tarik sejarah politik tergeser oleh sejarah sosial-ekonomi. Sebagian besar sejarawan Indonesia enggan memfokuskan diri pada sejarah politik, khususnya kondisi politik kontemporer. Sejarawan banyak yang tidak sadar bahwa konsep sejarawan politik Inggris, Lord Acton tentang kekuasaan telah dianggap sebagai suatu aksioma bagi publik. Menurut Acton, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Untuk itulah kekuasaan yang tidak terbatas pasti akan disalah gunakan secara tidak terbatas pula. (*Power tend corrupt, but absolute power corrupts absolutely*). Demikian pula pola pikir sejarawan ekonomi Rostow, cukup berpengaruh terhadap kehidupan politik khususnya pendekatan pembangunan di masa Orde Baru.

Disamping alasan akademis, surutnya sejarah politik juga disebabkan oleh realitas politik yang kurang kondusif bagi kajian sejarah politik. Pertama, perkembangan politik yang otoritarian di Indonesia kurang kondusif bagi kajian sejarah politik. Pada masa Orde Baru sejarah politik cenderung bersifat regimentatif. Beberapa sejarawan yang mengungkap peristiwa sejarah politik Indonesia modern dan kontemporer secara objektif sering mendapat tekanan politik dan perlakuan yang kurang bermartabat dari rezim yang berkuasa. Kasus tersebut pernah dialami oleh Sartono Kartodirdjo, Deliar Noer, Taufik Abdullah maupun Kuntowijoyo.

Praktek politik di Indonesia yang sering melanggar ide kebajikan (*virtue*) telah mencederai wacana publik dan membangun konstruksi kesadaran yang kurang positif. Perilaku politisi yang sering memperjuangkan kepentingan diri dan kelompoknya dan menghalalkan pelbagai cara menciptakan persepsi bahwa politik itu kotor. Banyak mahasiswa, dosen dan ilmuwan yang tidak tertarik dengan politik. Pengaruh pandangan positivisme bahwa ilmu bersifat netral ikut memberi sumbangsih terhadap sikap mereka. Mereka lupa bahwa kebijakan kurikulum, perubahan status lembaga pendidikan dari BHP menjadi BLU, tunjangan profesi bagi pendidik, sistem seleksi penerimaan mahasiswa, hingga pilihan konsumsi sehari-hari pun merupakan produk kebijakan politik. Anggota TNI dan PNS yang tidak mudah melakukan keinginan untuk “poligami” juga disebabkan oleh keputusan politik. Jadi sebagai warga negara jangan bersikap apolitis atau alergi dengan politik.

Jadi selain pengaruh dan daya tarik perkembangan sejarah sosial-ekonomi sebagai pertimbangan akademis, keengganan sejarawan Indonesia mengkaji sejarah politik juga disebabkan oleh praksis politik yang kurang beradab. Banyak sejarawan yang berusaha menghindari resiko “non akademis”. Atmosfir kekuasaan di masa Orde Baru yang otoritarian (Kuntowijoyo, 2003) menyebabkan sejarawan lebih merasa aman membahas masalah yang dianggap tidak “sensitif”, terutama sejarah politik kontemporer. Konsekuensinya, sejarah politik di Indonesia tidak berkembang dengan baik. Pemaknaan politik di ruang publik terlanjur mengalami distorsi. Politik diidentikkan dengan “akal-akalan”. Permainan yang curang, ingin menang sendiri, selalu memperjuangkan kepentingannya sendiri hingga menghalalkan segala cara dianggap sebagai suatu keniscayaan kehidupan politik. Makna “*pejoratif*” tersebut makin mendorong sejarawan ikut-ikutan enggan disebut sebagai sejarawan politik.

Dampaknya pada saat reformasi terjadi proses disorientasi dan dislokasi kesadaran publik, sejarawan tidak dapat memberikan pencerahan dan solusi politik secara maksimal. Para pengambil kebijakan masih sering melihat sejarawan sebatas sumber informasi peninggalan masa lampau yang eksotik. Sejarawan dianggap bukan partner dalam menggali solusi tantangan masa depan yang lebih baik. Ditambah lagi ilmu-ilmu social yang sering menjadi rujukan para pengambil kebijakan di Indonesia merupakan ilmu sosial yang bersifat “*normatif*” dan “*ahistoris*” (Kuntowijoyo, 1991; Kleden, 1988; Budiman, 1989)

Konsekuensi dari arah perkembangan historiografi tersebut menyebabkan sejarah politik (khususnya sejarah politik kontemporer) lebih banyak menjadi kajian ilmuwan sosial yang bukan sejarawan. Sejarah politik Indonesia modern dan kontemporer lebih banyak dikaji oleh ilmuwan sosial di luar sejarah dengan menggunakan pendekatan sejarah. George Truman Kahin, Benedict Anderson, Herbert Feith, Daniel Lev, Yahya Muhaimin, Mochtar Maso’ed, Daniel Dakidae, Salim Said atau yang lain sering

menjadi rujukan dalam melihat sejarah politik Indonesia kontemporer. Kalangan sejarawan seolah absen dari percaturan wacana politik kontemporer yang dihadapi oleh bangsanya.

Lemahnya kajian sejarah politik menyebabkan wacana politik kontemporer kurang diwarnai oleh sejarawan politik. Ilmu sejarah terasa gagap dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat zamannya. Sejarawan terlalu asyik dengan masa lalu. Sejarah seolah menjadi ilmu yang berdimensi antiquarian. Belajar sejarah hanya sekedar untuk mengenang masa lalu. Banyak sejarawan yang lupa menarik benang merah dari topik masa lalu yang dikaji dengan problem kekinian dan masa depan yang dihadapi oleh bangsanya. Sejarah yang mempunyai potensi rekreatif, edukatif, inspiratif, emansipatif, partisipatoris dan transformatif tidak dapat tampil secara menarik dan penuh makna.

Ilmuwan sosial, khususnya sejarah perlu menyikapi wacana politik secara kritis dan cerdas. Kita harus dapat membedakan antara peringatan politik terhadap suatu paham ilmiah dan kritik akademis terhadap suatu paham politik. *“Suatu peringatan politik bisa berkembang dan berakhir dengan pelarangan atau pembatasan terhadap paham-paham tertentu, sementara kritik akademis akan membuat seseorang matang menghadapi suatu paham ilmiah hingga dia dapat terhindar dari kebingungan, kegairahan yang berlebihan atau malah ketakutan terhadap paham tersebut”* (Kleden, 1988; xxxviii).

Kini setelah sejarah politik banyak mengadopsi perkembangan epistemology sejarah, ilmu-ilmu sosial dan atau sastra menjadikan sejarah politik menjadi salah satu genre sejarah yang banyak wajah. Sejarah politik yang baru menuntut perubahan cetak pikir (*mindset*) kalangan sejarawan, termasuk mengkaitkannya dengan sosiologi pengetahuan. Sejarawan seyogyanya siap berbeda dalam mendekati pelbagai peristiwa politik yang pernah terjadi. Setiap peristiwa politik selalu dipengaruhi dan mempengaruhi dimensi sosial, budaya, ekonomi dan yang lain. Kontroversi dalam narasi sejarah politik tidak harus dibelenggu. Sejarah sebagai wacana publik selalu berada dalam ruang interpretasi yang majemuk.

Eksistensi sejarah politik sebagai wacana maupun ilmu hanya dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam pemaparan bukti dan penalaran yang kritis dan cerdas. Narasi sejarah politik tidak memiliki klaim yang bersifat mutlak sebagaimana layaknya bahan indoktrinasi. Sejarah (politik) tidak mengutamakan hafalan melainkan pemahaman, pemaknaan, penalaran dan perjuangan yang memungkinkan manusia tumbuh dan berkembang menjadi lebih bijak dan cerdas. Melalui cara tersebut sejarah dapat menjadi referensi memperjuangkan kebajikan (*virtue*) umat manusia.

Hanya bangsa yang bersedia dan serius belajar dari sejarah (politik) yang dapat membangun kedaulatan bangsa dan negaranya secara cerdas, bijak dan bermartabat. Realitas kedaulatan bangsa dan negara yang kini sedang berproses merupakan hasil dari sejarah politik di masa lalu yang bertaut dengan pelbagai kekuatan politik, ekonomi, dan budaya dunia. Belum maksimalnya realisasi kedaulatan diri dan bangsa yang kini kita alami dapat diubah melalui kajian sejarah politik. Sejarah politik membuktikan bahwa masa lalu bangsa nusantara pernah memiliki kedaulatan politik yang membanggakan.

Nenek Moyang Kita Di Masa Lalu Memiliki Kedaulatan Yang Gemilang

Berdasarkan bukti-bukti sejarah, kedaulatan bangsa-bangsa di nusantara di masa lalu cukup gemilang. Beberapa negara tradisional di nusantara posisinya cukup disegani. Dalam suasana budaya politik tersebut kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara mampu menciptakan tata kelola kehidupan dan karya peradaban yang gemilang.

Pelbagai karya sastra mulai dari *I La Galigo*, *Ramayana* dan *Mahabharata* yang digubah sesuai dengan konteks kenusantaraan, Pararaton, Negarakertagama, Babad Tanah Jawi, hingga Hikayat Pasai merupakan contoh peradaban tulis menulis yang mengagumkan. Borobudur, Prambanan, perahu pinisi merupakan contoh budaya material yang tak terbantahkan. Penguasaan laut nusantara hingga Madagaskar merupakan bukti bahwa bangsa-bangsa di nusantara sejak dulu merupakan bangsa yang berdaulat. Mereka telah berhasil mengarungi lautan untuk menjalin relasi dengan bangsa lain secara bermartabat. Bukti pengaruh bangsa nusantara di benua Afrika hingga kini masih cukup kentara baik dalam situs sejarah maupun kosakata bahasa yang digunakan. Kedaulatan kerajaan yang ada di nusantara khususnya di era Sriwijaya dan Majapahit tidak hanya mengatur tata kelola kehidupan yang memiliki teritorial yang luas. Kerajaan-kerajaan di nusantara juga mampu membangun tata kehidupan yang mensejahterakan rakyatnya. Pada saat bangsa Barat masih terperosok dalam peradaban yang gelap (*The Dark Age*) atau abad pertengahan bangsa di nusantara telah berhasil membangun monumen besar.

Pada abad XIV - XVI masyarakat di nusantara sudah berhasil menciptakan tata niaga yang modern. Relasi pelayaran dan perdagangan di wilayah Asia Tenggara banyak dipengaruhi oleh kehadiran para pedagang dari nusantara. Ramai dan semaraknya perdagangan di Asia Tenggara berkat ada jaminan keamanan dari beberapa negara yang berdaulat di nusantara. Rakyat dapat menghasilkan hasil pertanian yang baik serta membangun perdagangan yang saling menguntungkan dengan bangsa lain (Leur, 1960; Reid, 1992).

Posisi negara-negara yang berdaulat di nusantara mampu memberikan kontribusi yang bersifat dialektis terhadap peradaban. Pelbagai pengaruh budaya yang masuk ke nusantara mampu dipadukan dengan nilai-nilai budaya yang sudah ada di nusantara. Tidak hanya akulturasi budaya saja yang terjadi. Nenek moyang di nusantara mampu melakukan kreasi kultural yang bersifat "local genius". Sebagai bangsa yang berdaulat nenek moyang kita berhasil mengembangkan peradaban yang cukup tinggi dan penuh dengan nilai-nilai luhur.

Sayangnya, perkembangan peradaban yang kurang memperhatikan aspek regenerasi dan sirkulasi elit yang mantab menyebabkan pergolakan politik melemahkan negara-negara di nusantara. Pasca jatuhnya kerajaan Majapahit tidak ada kerajaan yang memiliki wilayah luas dan kekuatan militer yang kuat dalam membangun persatuan sebagian wilayah nusantara dan atau melawan intervensi asing. Kedaulatan negara saling diperebutkan antar kerajaan. Sampai abad XVII tidak ada kerajaan yang memiliki kekuasaan yang membawahi sebagian besar wilayah nusantara.

Persaingan dan pertentangan di antara kerajaan-kerajaan yang ada mengakibatkan aktualisasi kedaulatan kerajaan di nusantara tidak berjalan maksimal. Pada saat suasana politik tersebut terjadi, beberapa bangsa Barat mulai merintis usaha mengarungi dunia untuk mencari rempah-rempah. Dampak "perang Salib"

menyebabkan nusantara menjadi “rebutan” bangsa-bangsa Eropa untuk memperoleh hasil bumi yang berlimpah, khususnya rempah-rempah. Rejeki yang berlimpah di nusantara mulai diserbu bangsa asing dan menyengsarakan warga aslinya.

Sejak saat itu beberapa wilayah kerajaan di nusantara dianeksasi dan dijajah. Kedaulatan sebagai suatu bangsa dan negara telah dirampas oleh penguasa asing. Kedaulatan politik hilang. Kedaulatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya juga ikut hilang. Penguasa pribumi kemudian menjadi wakil atau bawahan penguasa asing. Elit dan rakyat nusantara yang lama dijajah kemudian kehilangan kepercayaan diri sehingga timbul mental “rendah diri”. Bangsa Barat dianggap sebagai bangsa yang unggul dan super.

Seiring dengan surutnya beberapa kedaulatan kerajaan besar di nusantara dan konflik antar kerajaan maupun intrik dalam kerajaan yang berlarut-larut, kejayaan dan kebanggaan bangsa di nusantara mulai redup. Perbedaan dan konflik antar kekuatan dimanfaatkan oleh penguasa Barat sebagai sarana untuk menguasai beberapa wilayah di nusantara.

Kehadiran bangsa Barat di nusantara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perang Salib. Sebuah perang total yang berpengaruh besar terhadap sistem mata rantai perdagangan dunia. Bangsa-bangsa Barat berusaha menerobos mata rantai perdagangan dengan berusaha melakukan pelayaran langsung ke seluruh dunia. Bangsa Portugis dan Spanyol yang waktu itu merupakan negara superpower pada tahun 1494 membuat perjanjian “Tordesillas”. Mereka membagi dunia menjadi dua. Sebagian untuk Portugis dan bagian lainnya untuk Spanyol. Kemudian disusul Inggris dan Belanda ikut mencari keuntungan di nusantara. Mereka tidak hanya membangun relasi dagang tetapi juga berusaha melakukan aneksasi wilayah, dominasi dan eksploitasi.

Persaingan antar kerajaan di nusantara serta intrik dalam istana dimanfaatkan oleh kekuatan Barat sebagai salah satu pintu masuk dalam melakukan infiltrasi dan dominasi. Kekuatan superpower Spanyol dan Portugis setelah menemui pelbagai masalah pelayaran, khususnya setelah mereka bertemu di wilayah Maluku. Mereka mengatasi masalah yang dihadapi melalui perjanjian Saragosa. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian Tordesilas maupun Saragosa yang dilakukan bangsa yang jauh dari nusantara ikut mempengaruhi sejarah kehidupan politik dan ekonomi di nusantara.

Selain Spanyol dan Portugis, bangsa Barat lain, Inggris dan Belanda juga datang ke nusantara. Namun orang Belanda lebih sukses dibanding bangsa Barat yang lain. VOC sebagai perwakilan para pedagang Belanda –yang waktu itu masih sedang berjuang untuk merdeka dari kerajaan Spanyol-- lebih berhasil menancapkan kekuasaannya di nusantara. Setapak demi setapak VOC berhasil mengelabui dan mengalahkan beberapa penguasa pribumi. Tokoh-tokoh besar yang mandiri dan selalu berusaha menjaga martabat sekaligus kedaulatan negerinya berusaha dirongrong kekuasaannya. Tokoh yang memiliki kedaulatan diri sekaligus berusaha mempertahankan kedaulatan negaranya cenderung dimusuhi oleh VOC. Beberapa tokoh dari Indonesia Timur di abad XVII yang dimusuhi antara lain; Kakiali “*Kapiten Hitoe*” (m sekitar 1633-1643), Kaicili Nuku yang bergelar Sultan Amir Muhammad Saifuddin Syah dari Tidore atau Perdana Menteri Karaeng Pattinngallong (m 1639-54) dari Tallo, Sultan Hasanuddin Tumenanga ri Balla’pangkana (m 1653-69) dari Gowa. Mereka merupakan sosok

pemimpin yang berkarakter mandiri dan berani dan enggan menjadi vasal kekuatan politik asing. Untuk itu mereka dianggap berbahaya dan tidak disenangi.

Sebaliknya tokoh yang lemah dan bersedia menjadi vasal bangsa asing didukung oleh VOC. Beberapa tokoh tersebut antara lain; Sultan Mandar Syah (1648-75) dari Ternate. Dia bersedia menandatangani perjanjian pelarangan penanaman cengkeh kecuali di Ambon yang dikuasai oleh VOC. Kesepakatan ini menjadi dasar dilakukan "*Hongi Tochten*", pelayaran Hongi yang kejam oleh VOC. Sultan Hairul Alam Kamaluddin dari Tidore mendapat dukungan dan perlindungan kekuasaan dari VOC. Demikian pula sosok La Tenritatta to Unru atau yang lebih dikenal Arung Palaka (1634-96) dari Bone berhasil menjadi penguasa berkat dukungan dan lindungan VOC.

VOC setelah berhasil membuat benteng di Ambon pada tahun 1602, kemudian berhasil mendirikan benteng di Jayakarta dan menguasainya sebagai daerah yang berdaulat sejak tahun 1619. VOC berhasil menguasai Jayakarta yang kemudian diubah namanya menjadi Batavia setelah Sultan Agung raja terkenal dari Mataram gagal mengusirnya pada tahun 1628 dan 1629. Kekuasaan VOC makin dominan di nusantara setelah berhasil merebut benteng di selat Malaka dari kekuasaan Portugis pada tahun 1641.

Batavia menjadi benteng sekaligus pangkalan utama VOC dalam usaha mencari "rejek" sebanyak-banyaknya di nusantara. Beberapa perlawanan anak-anak nusantara yang dilakukan secara sporadis dan mengandalkan kekerasan banyak mengalami kekalahan. Intrik dan perselisihan antar kerajaan dan ataupun antar keluarga istana dimanfaatkan oleh VOC untuk mencari pengaruh dan menancapkan dominasi serta hegemoninya di kerajaan yang ada di nusantara. Pada saat ada perselisihan antara Amangkurat 1 dengan Trunojoyo posisi Mataram sempat terdesak. Pada tahun 1677 Amangkurat 1 dan VOC kemudian membuat perjanjian yang berisi bahwa VOC akan memberi bantuan Mataram dengan imbalan konsesi ekonomi, termasuk pembebasan cukai.

Pasca kematian Amangkurat I, putra Amangkurat II mengganti posisi ayahnya sebagai raja Mataram. Namun, keraton Mataram sudah diduduki oleh pasukan Trunojoyo. Dalam kondisi yang lemah Amangkurat II merasa tidak ada pilihan selain minta bantuan VOC dengan konsekuensi memberi konsesi yang lebih besar pada VOC. Apalagi setelah Trunajaya dapat dikalahkan istana Mataram masih diduduki oleh Pangeran Puger yang masih paman dari Amangkurat II. Akibatnya Amangkurat II masih membutuhkan bantuan VOC semakin dalam untuk menggapai tahtanya. "*Perang Sukses Jawa I*" (1704-8) dan "*Perang Sukses Jawa II*" (1719-23) makin melemahkan posisi Mataram. Puncak dari melemahnya Mataram adalah pergantian tahta sekaligus pembagian wilayah di Mataram yang langsung dikendalikan VOC yaitu ketika terjadi "*Perang Sukses Jawa III*" (1746-57).

Perang Sukses Jawa III menghasilkan perjanjian yang memecah wilayah Mataram menjadi tiga kerajaan. Perjanjian Gianti (1755) menjadi dasar berdirinya keratin Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat dengan menempatkan Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana I. Perjanjian Salatiga (1757) yang menjadi dasar berdirinya kerajaan Mangkunegaran dengan menempatkan Raden Mas Said sebagai Pangeran Adipati Mangkunegara I. Bangsa asing yang diwakili oleh VOC telah menempatkan kerajaan Mataram sebagai vasal. Kedaulatan raja-raja di Mataram sudah hilang. Kemudian disusul oleh berdirinya kerajaan Pakualaman yang didirikan oleh Inggris pada tahun 1812. Para penguasa di wilayah Mataram harus tunduk pada

penguasa asing. Kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu munculnya mental dan keyakinan bahwa berkat dukungan asing, mereka dapat mempertahankan kekuasaan.

Dari Batavia VOC mengontrol kekuasaan di beberapa wilayah nusantara. Di luar Jawa VOC menggunakan plakat panjang sebagai media mengontrol kekuasaan para raja dan bangsawan. Kekuasaan VOC yang besar tidak dapat bertahan secara internal akibat praktik korupsi yang merajalela serta mismanagemen. Di akhir penghujung abad XVIII, tepatnya tanggal 31 Desember 1799 VOC secara resmi diganti oleh pemerintah colonial Belanda. Mulai tahun 1800 beberapa kerajaan di nusantara menjadi jajahan langsung pemerintah kolonial Belanda tanpa melalui perantara VOC. Sejak itu proses penjajahan Belanda di nusantara makin ekstensif dan intensif.

Ketika Eropa dilanda Revolusi Perancis yang kemudian juga menimbulkan perang Eropa, khususnya antara Perancis dengan Inggris wilayah nusantara kena dampaknya. Pada saat wilayah Belanda dikuasai Perancis, gubernur jenderal yang diangkat di nusantara Daendels diberi tugas utama mempertahankan wilayah nusantara dari serbuan Inggris. Sebaliknya, ratu Belanda yang berada di pelarian Inggris memerintahkan pejabat Belanda untuk menyerahkan wilayah nusantara pada Inggris. Dan Inggris pada tahun 1812 berhasil merebut wilayah nusantara dan menjadi penjajah nusantara. Setelah Inggris dapat mengalahkan Perancis, Inggris berharap negara Belanda dapat menjadi “Negara tameng” yang kuat. Untuk itu wilayah jajahan nusantara dikembalikan lagi oleh Inggris pada Belanda. Nusantara menjadi jajahan pemerintah kolonial Belanda lagi.

Proses perluasan wilayah jajahan dan aneksasi dilakukan secara intensif oleh pemerintah kolonial Belanda. Madura yang sebelumnya sudah dikuasai oleh VOC (1705) pada tahun 1828 dijadikan menjadi bagian dari karesidenan Surabaya. Bali melalui proses perang yang panjang sejak tahun 1882 dijadikan menjadi satu karesidenan dengan Lombok, yaitu karesidenan Hindia Timur Belanda. Namun proses penaklukan secara keseluruhan terjadi pada tahun 1908 setelah terjadi perlawanan yang terakhir, yaitu perang “*puputan*” dari raja Badung.

Daerah NTT berhasil dikuasai secara penuh pada tahun 1905-7. Palembang dikuasai lagi sejak tahun 1823. Makasar berhasil dikuasai lagi oleh Belanda pada tahun 1825. Minangkabau dikuasai pada tahun 1837. Irian Barat dikuasai pada tahun 1898. Banjarmasin dikuasai secara penuh dan langsung sejak tahun 1860. Toraja dapat dikuasai pada tahun 1905. Berdasarkan traktat Sumatera tahun 1871 Belanda mulai melancarkan serangan ke Aceh sejak tahun 1873 dan relatif memiliki kekuasaan permanen pada tahun 1903. Inti dari perjanjian Sumatera pada bulan November 1871 antara Inggris dan Belanda adalah pertukaran wilayah jajahan. Belanda menyerahkan Pantai Emas di Afrika pada Inggris dan Belanda diberi kebebasan penuh menguasai Sumatera, termasuk Aceh.

Persaingan, perselisihan antar kerajaan di nusantara menyebabkan identitas kebersamaan sebagai satu bangsa nusantara sulit tumbuh. Elit pribumi yang dulu memiliki kedaulatan secara bergantian telah kehilangan kekuasaan. Mereka kemudian banyak yang menjadi pelayan penguasa asing. Sebaliknya para pahlawan yang memiliki “harga diri” dan berusaha memperjuangkan kedaulatan negerinya dihukum dan dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro (1825-1830) di Jawa dan Imam Bonjol (1821 – 1837) di Sumatera merupakan contohnya.

Timbullah mental menghamba di kalangan elit. Pengalaman mengutamakan kepentingan asing oleh elit menyebabkan berkembangnya mental “komprador”. VOC yang diganti oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1800 dapat mengendalikan dan menanamkan kekuasaannya di nusantara. Belanda memanfaatkan penguasa pribumi sebagai media eksploitasi terhadap rakyat dan negara. Pemimpin pribumi yang dulu berkepentingan melindungi rakyat, sejak menjadi bawahan asing cenderung melindungi kepentingan diri dan kekuasaannya. Terjadilah relasi antara kekuatan imperialisme kapitalisme dengan feodalisme dalam mengeksploitasi rakyat nusantara. Kekuatan politik ekonomi internasional menjalin hubungan dengan kekuatan ekonomi politik lokal yang makin meminggirkan kedaulatan rakyat.

Untuk memperoleh hasil eksploitasi yang besar pada tahun 1830 pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan *Cultuurstelsel* atau “*Tanam Paksa*”. Kebijakan yang diusulkan oleh Johannes van den Bosch (1780 – 1844) tahun 1929 tersebut banyak mengubah pola penajahan di Jawa. Kondisi keuangan kerajaan Belanda segera mengalami surplus. Selama rentang waktu tahun 1831 – 1877 negeri Belanda telah menerima 832 juta gulden. Selain kerajaan Belanda yang teruntungkan oleh system “*Tanam Paksa*” adalah elit birokrasi di tingkat desa hingga para bupati, pedagang timur asing (Cina dan Arab) serta pejabat dan pedagang Eropa.

Kesejahteraan rakyat Belanda di abad XIX makin meningkat. Wawasan rakyat Belanda makin luas. Mereka mulai mempertanyakan pola kekuasaan pemerintahan kolonial yang dianggap konservatif. Mereka mengkritisi kebijakan yang tidak melibatkan pihak swasta dalam mengeksploitasi daerah jajahan. Muncullah ide kebebasan termasuk penganut aliran liberalisme dalam bidang ekonomi. Campur tangan negara pada bidang ekonomi yang berlebihan dianggap bertentangan dengan semangat zaman.

Rejeki yang berlimpah dari daerah jajahan memungkinkan beberapa penduduk Eropa menjadi pengusaha. Mereka menuntut dilibatkan untuk ikut berinvestasi di nusantara. Pola eksploitasi yang lama dianggap sudah kadaluwarsa dan perlu diganti dengan pola yang baru. Pola yang baru adalah memberi ruang dan peluang pada pihak swasta “investasi” di daerah jajahan. Mereka menuntut pengurangan peran pemerintah dalam perekonomian tanah jajahan. Eksploitasi yang konservatif diganti dengan pola eksploitasi liberal. Dalam kenyataannya menurut Ricklefs (2007; 268) “mereka ingin dibebaskan dari *cultuurstelsel* tetapi tidak dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh Belanda dari Jawa”. Mirip kondisi di akhir Orde Baru. Kekuatan politik ekonomi internasional tidak respek dengan pemerintahan yang otoriter. Mereka mendukung aktivis HAM dan demokrasi, tetapi mereka masih tetap tertarik dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia.

Eduard Douwes Dekker (1820-87) dengan menggunakan nama samaran Multatuli yang pernah menjadi residen di Lebak menuliskan pengalaman rakyat pribumi yang dieksploitasi penjajah dan elit pribumi. Dia mengungkapkan keprihatinannya dalam suatu novel yang cukup terkenal “*Max Havelaar*” (1860). Buku ini menjadi salah satu senjata kaum kapitalis liberal dalam menyerang peran dominan pemerintah dalam perekonomian di tanah jajahan.

Sejak tahun 1870-an *Tanam Paksa* diganti dengan pola eksploitasi yang lebih liberal. Era tersebut dalam sejarah politik Indonesia sering disebut zaman “politik pintu terbuka”. Nusantara tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda mulai membolehkan pihak swasta untuk ikut terlibat dalam

proses “pengerukan rejeki”. Masuklah pelbagai perusahaan swasta dari Belanda, Inggris, Jerman serta Amerika untuk “*investasi*” di nusantara. Perkebunan dan industri di nusantara mulai banyak dikelola oleh pihak swasta. Kanal dalam melakukan eksploitasi terhadap rakyat dan kekayaan nusantara menjadi makin beragam.

Tumbuh kembangnya investasi perkebunan dan industri di nusantara yang cepat membutuhkan sarana dan prasarana yang makin banyak. Dibangunlah sarana transportasi yang lebih baik. Jalan darat, jalur kereta api serta pelabuhan dibangun dengan besar-besaran. Daerah-daerah yang banyak menghasilkan investasi dibangun menjadi kota-kota modern yang lebih tertata dan “*nyaman*” bagi para pejabat dan pengusaha swasta.

Pertumbuhan “*pembangunan ekonomi*” (tepatnya eksploitasi) di nusantara di akhir abad XIX memang berhasil meningkatkan pendapatan dan kekayaan kerajaan Belanda dan para pengusaha swasta. Salah satunya pengusaha Belanda pada tahun 1888 mendirikan perusahaan minyak “*Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum-bronnen in Nederlandsche Indie*” (perusahaan Kerajaan Belanda bagi eksploitasi sumber-sumber minyak bumi di Hindia Belanda). Pengusaha Inggris pada tahun 1897 di London mendirikan perusahaan “*Shell Transport and Trading Company*”.

Kedua perusahaan milik pengusaha Belanda dan Inggris tersebut pada tahun 1907 merger menjadi “*Royal Dutch Shell*” yang di awal abad XX mampu memproduksi sekitar 85% keseluruhan minyak bumi Indonesia. Kemudian disusul dengan berdirinya beberapa perusahaan minyak pengusaha Amerika antara lain Caltex (California Texas Oil Company) dan Stanvac (Standard Vacuum Oil Co.). Kerajaan Belanda pada tahun 1888 juga mendirikan perusahaan pelayaran nusantara KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij). Perusahaan pelayaran ini kemudian menjadi pemegang monopoli pelayaran di wilayah nusantara. “*Internasionalisasi investasi*” terhadap kekayaan bumi Indonesia sudah dirintis sejak masa penjajahan. Sebaliknya nasib rakyat pribumi makin sengsara.

Posisi sosial dan ekonomi yang lebih rendah dibanding kelompok Timur Asing, menyebabkan daya tawar penduduk pribumi sangat lemah. Kemandirian politik, ekonomi dan kepribadian warga pribumi sangat rentan. Perasaan rendah diri berhadapan dengan bangsa asing, terutama bangsa kulit putih cukup kuat. Budaya “*jongkok*” dan “*membongkok*” dianggap biasa, bahkan luhur. Dalam aktivitas pencaharian penduduk pribumi menjadi kuli di negerinya sendiri. Nasibnya makin tragis karena penguasa pribumi lebih peduli dengan penguasa kolonial dibanding nasib rakyatnya (Vleke, 2008). Konsekuensinya relasi kapitalisme dan feodalisme di nusantara menciptakan ketidakadilan yang masif.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa pejabat Belanda yang menganut pandangan humanis dan etis ada yang tergugah hatinya. Salah satunya adalah C. Th. Van Deventer. Ahli hukum ini pernah tinggal di Nusantara tahun 1880-97. Van Deventer yang melihat relasi yang sangat merugikan bangsa di nusantara dan menguntungkan Belanda. Bangsa Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia. Dia menulis artikel berjudul “*Een eereschuld*”, (suatu hutang kehormatan) dalam jurnal Belanda de Gids. Menurut pemerintah kerajaan Belanda perlu melakukan “*politik balas budi*”

terhadap masyarakat pribumi. Dia mengusulkan diterapkannya “*Trilogi van De Venter*” (irigasi, edukasi dan imigrasi) untuk mengurangi penderitaan rakyat pribumi.

Perubahan tatananan ekonomi politik serta dorongan dari beberapa tokoh humanis dan liberal, akhirnya pemerintah kolonial Belanda menerapkan “*Politik Etis*”. Salah satu program dari politik etis adalah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan modern untuk masyarakat pribumi. Kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih trampil menyebabkan kebijakan mendirikan lembaga pendidikan tidak mendapat resistensi yang kuat dari kalangan pejabat kolonial maupun pengusaha swasta. Mereka justru mendukungnya untuk memperoleh tenaga trampil yang lebih murah dan mudah dikelola.

Sejak awal abad XX makin banyak lembaga pendidikan modern yang didirikan. Masyarakat pribumi yang berkenalan dengan pengetahuan modern –walaupun tetap dibatasi—jumlahnya makin banyak. Kalangan priyayi rendahan mulai banyak yang memasuki lembaga pendidikan modern. Perkenalan anak-anak pribumi dengan pengetahuan modern membawa dampak yang cukup signifikan dalam perubahan gaya hidup dan cara berpikirnya. Sebagian dari mereka yang terdidik mulai memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Sejak itu perjuangan terhadap penjajah dilakukan dengan cara yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka mulai menanyakan dan melihat kemiskinan dan kebodohan yang dialami masyarakat pribumi dengan cara yang baru. Luluh lantaknya kedaulatan diri dan masyarakat pribumi yang mengalami hegemoni dan eksploitasi penjajah digugat. Anak-anak pergerakan mulai merintis perjuangan yang lebih berorientasi pada peningkatan harkat dan martabat bangsanya.

Meretas Harkat dan Martabat untuk Menggapai Kedaulatan Bangsa

Perkenalan ilmu pengetahuan modern memberi percikan kesadaran kritis terhadap beberapa anak pribumi yang tercerahkan. Walaupun jumlah mereka yang tersentuh dan memiliki keprihatinan emosional dan intelektual yang ada hanya kelompok kecil, namun pengaruhnya terhadap kesadaran sejarah cukup signifikan (van Niel, 1984, Simbolon, 1997). Mereka mulai berani mempertanyakan realitas masyarakat yang dililit keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Keterpurukan masyarakat di nusantara tidak dianggap sebagai takdir.

Keterbelakangan masyarakat pribumi juga bukan karena sikap dan mental yang malas semata. Nasib bangsa di nusantara yang terpuruk lebih banyak disebabkan oleh suatu sistem yang tidak adil. Sistem imperialisme dan kolonialisme itulah sumber utama kenistaan bangsa-bangsa di nusantara. Hebatnya mereka tidak hanya ingin menengahkan sistem eksploitasi yang dilakukan asing, melainkan juga eksploitasi yang dilakukan oleh bangsa sendiri. Tokoh-tokoh pergerakan, terutama yang beraliran radikal selain menentang imperialisme dan kapitalisme juga menentang feodalisme (Shiraisi, 1997).

Sebenarnya “*kedaulatan bangsa dan negara Indonesia*” merupakan suatu konsep yang telah menjadi topik utama anak-anak pergerakan dalam berjuang menggapai kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan masyarakat di nusantara akibat bangsa-bangsa di nusantara tidak lagi memiliki kedaulatan. Kedaulatan telah menjadi monopoli kekuasaan kolonial. Sejak itu

perjuangan merumuskan makna kedaulatan sekaligus memperjuangkan kedaulatan bangsa menjadi agenda utama gerakan kelompok radikal.

Sebagai masyarakat terjajah anak-anak bumi putera mengalami proses dehumanisasi. Potensi kemanusiaan yang dimiliki telah dirampas oleh kekuasaan colonial dan feodal. Konsekuensinya mental inferior telah merambah mindset kebanyakan anak-anak nusantara. Pribadi anak-anak bumi putera terstigmatisasi dalam konsep inlander yang rendah diri, kurang percaya diri, malas, bodoh dan miskin. Menurut Soekarno dalam bukunya Mencapai Indonesia Merdeka, dikatakan bahwa rakyat Indonesia telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Rakyat nusantara yang dulu memiliki "*semangat harimau*" "*semangat banteng*" berubah menjadi "*semangat kambing yang lunak dan pengecut*". Dan yang lebih parah, rakyat Indonesia kemudian percaya bahwa mereka memang "rakyat Kambing". (Soekarno, 2005; 276)

Kondisi tersebut menggugah kesadaran anak-anak pergerakan. Sebagian kalangan terdidik yang tercerahkan berusaha mengurai keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan yang membelit masyarakat nusantara. Ironisnya, akibat kedaulatan yang telah lama terampas dari tangan bumi putera proses eksploitasi, dominasi dan hegemoni bangsa penjajah dianggap sebagai suatu kewajaran. Belanda sebagai suatu negara kecil yang berhasil menjajah wilayah nusantara yang luas tidak dianggap sebagai suatu keganjilan.

"Ndara Londo" tetap disembah dan dihormati.

Penjajahan tidak hanya merampas bangsa nusantara kehilangan kedaulatan di bidang politik dan ekonomi. Rakyat nusantara juga telah kehilangan kedaulatan di bidang budaya. Kedaulatan dan kepercayaan diri anak-anak nusantara telah terkikis akibat proses dehumanisasi sistem kapitalisme dan feodalisme (Hariyono, 2008a). Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang perintis pergerakan nasional Abdul Rivai bahwa nasib bangsa Indonesia cukup tragis; "*... kekuasaannya diambil bangsa Asing, kekayaan tanahnya di tangan bangsa Asing, kepandaian kerja tidak ada, kerajinan bekerja tidak sebesar kerajinan bangsa Asing, kekerasan hati tidak memadai, dan ilmu dan kepintaran buat berlomba dalam penghidupan tidak cukup*" (Rivai, 200:5)

Usaha untuk berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia pada hakekatnya adalah upaya untuk merebut kedaulatan diri dan negeri dari penjajah. Kedaulatan diri rakyat nusantara dilecehkan oleh sistem kolonial. Warna negara nusantara disejajarkan dengan anjing sehingga di beberapa tempat disebutkan bahwa bumiputera dan anjing dilarang masuk. Menurut Sukarno (Adam, 1966; 67) "*kami adalah bangsa yang dipermalukan, diperlakukan seperti sampah oleh para penindas kami*".

Untuk itulah tokoh-tokoh pergerakan sebelum berhasil menggapai kedaulatan negara sudah berjuang merealisasi kedaulatan dirinya. Mereka bermimpi kedaulatan yang nanti telah direbut perlu dipelihara dan dibangun untuk kesejahteraan rakyat. Bagi golongan politik radikal yang menerapkan politik non kooperasi, kedaulatan merupakan prasyarat mutlak yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

Perjuangan kemerdekaan yang dilakukan dalam perumusan kedaulatan dilakukan secara komprehensif oleh aktivis Perhimpunan Indonesia, PNI, Partindo dan PNI-

Pendidikan. Mereka tidak hanya berhasil memberikan cara pandang yang radikal akan arti kemerdekaan melainkan juga mengkaitkan kedaulatan dengan rakyat. Indonesia modern yang dikonstruksi oleh anak-anak pergerakan bukan semata-mata kedaulatan negara, melainkan juga dikaitkan dengan kedaulatan rakyat. Mereka secara tegas memilih bentuk pemerintahan republik bukan monarki untuk Indonesia setelah merdeka.

Konsep kedaulatan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa adalah suatu kedaulatan yang holistik, emansipatoris sekaligus profetis. Kedaulatan secara holistic yaitu mencakup kedaulatan dalam tataran negara hingga tataran kedaulatan diri, khususnya menyangkut kedaulatan rakyat. Dimensi kedaulatan tidak hanya mencakup aspek politik, melainkan juga aspek ekonomi, sosial dan budaya. Mereka telah berani “berpikir sendiri”. Tokoh-tokoh pergerakan telah keluar dari inferioritas, ketidakdewasaan dan kepicikan sendiri akibat belenggu penjajahan yang cukup lama. Para pendiri bangsa bahkan kemudian berhasil mengalahkan ketidakmatangan dan kepicikan sendiri (*self-incurred tutelage or immaturity*) sekaligus mengatasi kotak-kotak primordial yang membelenggu aspek kebangsaan (Riyanto, 2011; 130).

Berdimensi emansipatoris karena kedaulatan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa adalah suatu proses mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia tanpa terseret untuk merendahkan bangsa asing. Nasionalisme Indonesia menghindari chauvinisme atau jingoisme. Kedaulatan yang diperjuangkan oleh pendiri bangsa selain untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat dan bangsa Indonesia juga digunakan untuk ikut serta menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Namun yang paling utama harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Rumusan kedaulatan para pendiri bangsa bersifat profetis karena kedaulatan yang diperjuangkan bukan untuk sekedar mengatasi masalah yang kini dan di sini. Kedaulatan bangsa Indonesia dimaknai sebagai konsep yang dinamis. Kedaulatan bangsa Indonesia diperjuangkan dan direalisasi dalam rangka mengantisipasi perkembangan tata dunia ke depan menjadi lebih baik dan bermartabat.

Masa Pergerakan Nasional: Selalu Belajar Dari Sejarah.

Mereka memang tidak dididik sebagai sejarawan atau guru sejarah, namun pengetahuan dan kesadaran sejarah mereka sangat memadai. Pelbagai tulisan dari Agus Salim, Tan Malaka, Sukarno, Hatta, Sjahrir, Moh. Yamin mencerminkan akan pemahaman sejarah yang cukup luas dan mendalam. Sejarah oleh anak-anak pergerakan digunakan sebagai media penyadaran dan lebih khusus sebagai referensi dalam membangun watak bangsa, “*Nation and Character Building*”. Mereka tidak hanya belajar sejarah, mereka juga memposisikan diri sebagai pelaku dan agen sejarah. Komitmen intelektual yang tinggi menempatkan mereka sebagai bagian dari intelektual organik.

Beberapa tokoh dan organisasi pada awalnya berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Harkat dan martabat rakyat pribumi yang memprihatinkan ingin diperjuangkan. Beberapa usaha pendidikan dan organisasi sosial menjadi orientasi utama mereka. Seiring dengan proses perjuangan yang keras dalam menghadapi sistem colonial yang eksploitatif dan segregatif makin menyadarkan tokoh-tokoh

pergerakan bahwa harkat dan martabat rakyat nusantara tidak dapat diperjuangkan tanpa adanya kedaulatan bangsa dan negara.

Kedaulatan yang dikonstruksi dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa mencakup pelbagai dimensi. Mereka tidak ingin memerjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia hanya dalam bidang politik. Kedaulatan politik tidak akan dapat direalisasi dan memiliki basis yang kokoh tanpa kedaulatan budaya dan ekonomi (Hariyono, 2009).

Perpaduan kedaulatan politik dan ekonomi tidak akan memberikan makna yang manusiawi tanpa dibingkai dalam nilai-nilai kultural yang telah menjadi kepribadian bangsa. Substansi dari pemikiran tersebut kemudian dibingkai menjadi bagian dari Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sejak awal tidak hanya diarahkan untuk mensitimulasi tumbuh kembangnya pribadi-pribadi manusia Indonesia yang baik. Pancasila sejak awal perumusannya lebih diorientasikan sebagai dasar negara yang diharapkan menjadi sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks itulah praktek kehidupan politik, ekonomi dan budaya, khususnya yang terkait dengan regulasi yang menata struktur kehidupan berbangsa dan bernegara harus selalu mengacu pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus falsafah bangsa perlu secara terus menerus dijadikan rujukan dalam proses pembangunan.

Sejak itu sebagian tokoh pergerakan mulai merintis perjuangan yang bersifat non kooperatif. Perjuangan yang dilakukan diungkapkan secara lugas untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Rintisan dan perjuangan menggapai kedaulatan bangsa menjadi orientasi utama. Menurut mereka harkat dan martabat bangsa hanya dapat dibangun dan dikembangkan dengan baik kalau kedaulatan negara sudah dapat dicapai. Usaha untuk merebut dan mengusir penjajahan merupakan prasyarat mutlak untuk menggapai kedaulatan bangsa. Momentum proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi media untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Usaha Merealisasi Kedaulatan Pasca Kemerdekaan Tidak Mudah

Di awal kemerdekaan upaya untuk merealisasi, mempertahankan dan merebut kedaulatan telah menghadapi tantangan yang riil dengan segala kompleksitasnya. Pelbagai elemen masyarakat telah memaknai kemerdekaan atau kedaulatan secara beragam. Pada satu sisi ekstrem kedaulatan dimaknai sebagai bentuk kehidupan yang bebas dari segala aturan yang ditinggalkan oleh penjajah. Di tataran realitas kekuatan militer Jepang yang telah mendapat tugas dari Sekutu untuk menjaga status quo masih cukup kuat dan berkuasa. Kabinet RI di masa revolusi nasional tidak mampu menjalankan pemerintahan secara maksimal. Perhatian dan energi bangsa terkonsentrasi untuk mempertahankan kedaulatan politik dari rongrongan militer Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.

Setelah KMB proses untuk merealisasikan kedaulatan juga tidak mudah direalisasi oleh pemerintah. Sejak kabinet Hatta, Natsir, Sukiman, Wilopo hingga Ali Sastroamijoyo II, pemerintah Indonesia terikat dengan perjanjian KMB. Hasil KMB bersifat legal binding (mengikat secara hukum) baik pada pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Sebagian besar aset ekonomi dan finansial yang ada di Indonesia menurut perjanjian KMB masih dikuasai oleh asing, khususnya Belanda.

Para pengusaha Belanda yang merasa memiliki "hak historis" tetap mengelola perusahaan dan perkebunan besar. 10 perusahaan besar Belanda yang cukup besar dalam menguasai aset ekonomi di Indonesia adalah; Borneo-Sumatra Maatschappij (Borsumij), Lindeteves NV, *Internationale Credit-en Handelsvereniging Rotterdam* (Internatio), Jacobson van den Berg, Geo Wehry, Harmsen en Verwey, Deli Atjeh NV, Molukshe Handelsvereniging, Mirandole & Voute, Reis Compagnie. (Muhaimin, 1991; 30). Akibatnya sekitar 25% GDP Indonesia masih dimiliki dan dikontrol oleh Belanda (Wie, 2002; 377).

Perusahaan minyak Amerika Stanvac dan Caltex juga masih mengeksplorasi minyak. Transportasi laut masih didominasi oleh perusahaan pelayaran Belanda, KPM. Kepemilikan dunia perbankan masih dikuasai oleh perusahaan Belanda, Inggris dan Cina. Bank sentral dilakukan oleh "The Java Bank" yang baru dinasionalisasi melalui ganti rugi oleh pemerintah RI tahun 1954. Beban pemerintah makin berat karena berdasarkan hasil KMB pemerintah Indonesia menanggung hutang Belanda sebanyak sekitar 776 juta gulden (Katoppo, 2000, 95). Beban finansial tersebut dihitung dari belanja Belanda, termasuk biaya perang dengan RI. Maka tidak berlebihan kalau ada yang menyatakan bahwa secara ekonomi, Indonesia belum merdeka karena banyak aset ekonomi yang dimiliki oleh asing (Ricklefs, 2007; 475).

Lemahnya kedaulatan ekonomi di era tahun 1950-an menyebabkan pemerintah menghadapi situasi yang cukup kompleks. Pemerintah sejak kabinet Natsir telah membuat kebijakan Benteng yang bertujuan melindungi masyarakat pribumi dalam berusaha di bidang ekonomi. Namun, karena masih banyak birokrat dan pengusaha Indonesia yang berjiwa "kerdil", beberapa lisensi yang diperoleh justru diperjualbelikan. Munculah pola bisnis "Ali Baba". Suatu kegiatan ekonomi seolah dilakukan dan menjadi milik pribumi (Ali). Tetapi, dalam prakteknya yang mengendalikan di belakang adalah kelompok non pribumi (Baba).

Kesulitan ekonomi yang dihadapi pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga Demokrasi Terpimpin dianggap sebagai suatu kesalahan strategi. Kegagalan pembangunan ekonomi sejak era revolusi nasional kurang dikaitkan dengan kondisi sosial-ekonomi-politik riil bangsa Indonesia yang selain disibukkan oleh keamanan nasional juga oleh masih dikuasainya sebagian besar aset strategis Indonesia oleh pihak asing. Proses menciptakan keamanan nasional, khususnya dalam menghadapi pemberontakan PRRI dan Permesta yang memaksa pemerintah menggunakan lebih dari 70 % anggaran untuk menutup biaya operasi keamanan.

Suasana dan dinamika politik yang keras di akhir masa demokrasi Liberal mendorong pemerintah menerapkan keadaan darurat perang pada tanggal 14 Maret 1957. Sejak saat itu jajaran militer mulai terlibat dalam pelbagai bidang diluar keamanan. Praktek kehidupan yang demokratis mulai tergeser oleh pemerintahan yang otoritarian, terutama sejak diterapkan zaman demokrasi terpimpin.

Perselisihan antar komandan militer daerah dengan pimpinan AD (KSAD) makin mengeras. Demikian pula tuntutan daerah untuk memperoleh bantuan dan perhatian pemerintah pusat makin menambah kompleksitas masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Usaha untuk menyelesaikan masalah melalui proses dialog, yaitu Munas dan Munap mengalami kebuntuan setelah timbul peristiwa Cikini. Mengendurnya dialog justru memberi ruang daerah untuk melakukan perlawanan bersenjata. Timbullah pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dibawah pimpinan

Kolonel Ahmad Husein yang sekaligus menjadi dewan Banteng. Pemerintahan PRRI dipimpin oleh Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara. Demikian pula di Sulawesi meletus pemberontakan Permesta dibawah pimpinan Letkol H.N.Ventje Sumual, komandan Dewan Manguni.

Pemerintah RI dalam waktu singkat berhasil mematahkan pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi yang dibantu oleh Amerika (Kahin & Kahin, 1995; Conboy & Morrison, 1999). Konsolidasi wilayah NKRI relatif berjalan baik. Namun ada wilayah RI yang sejak proklamasi kemerdekaan masih dikuasai oleh Belanda, yaitu Irian Barat Sejak perjanjian KMB, Belanda berusaha menunda pengembalian wilayah tersebut cenderung menunda penyerahan. Perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan wilayah teritorial Indonesia menjadi keniscayaan.

Pada masa demokrasi terpimpin upaya memperjuangkan kedaulatan memiliki tantangan yang berat, terutama perebutan kembali Irian Barat hingga usaha pendirian negara Malaysia. Perebutan Irian Barat melalui jalan diplomasi yang mengalami kebuntuan dalam sidang umum PBB mendorong dilakukan proses nasionalisasi. Sejak tahun 1957 beberapa partai politik dan buruh menuntut pengambilalihan perusahaan dan perkebunan Belanda yang tidak bersedia mengembalikan Irian Barat. Nasionalisasi berlangsung pada saat keadaan darurat diberlakukan. Demi alasan ketertiban dan keamanan jajaran perwira militer banyak yang “dikaryakan” untuk mengurus masalah ekonomi, khususnya perusahaan dan perkebunan yang dinasionalisasi. Kedaulatan politik dalam mempertahankan wilayah teritorial menjadi retorika yang menonjol di era demokrasi terpimpin.

Usaha “merebut kembali” Irian ke pangkuan ibu pertiwi dilakukan diplomasitingkat tinggi. Indonesia meminta bantuan dan persenjataan dari Uni Soviet sehingga kekuatan militer cukup disegani. Pada Amerika bangsa Indonesia memanfaatkan suasana perang dingin. Berkat desakan dari Amerika, Belanda tidak dapat mengelak untuk menyerahkan Irian Barat ke Indonesia melalui UNCI. Berdasarkan jajak pendapat pada tahun 1963 Irian Barat secara resmi menjadi bagian wilayah NKRI.

Belum sempat konsentrasi pembangunan diarahkan pada pembangunan ekonomi pasca perebutan Irian Barat bangsa Indonesia sudah mengalami pergolakan politik yang keras lagi. Rencana Inggris mendirikan negara Malaysia sempat menimbulkan ketegangan politik. “*Ganyang Malaysia*” mendorong diberlakukan keadaan darurat.

Suasana kehidupan ekonomi yang tidak mengalami pertumbuhan memberi ruang bagi penerapan ekonomi yang pro pasar menebarkan pesona. Peristiwa dinihari 1 Oktober 1965 menjadi media untuk merealisasi tatanan ekonomi yang berbeda dengan masa sebelumnya. Kelompok ekonom Universitas Indonesia yang kebanyakan alumni “*Berkeley*” yang sebelumnya sudah terlibat dalam pengembangan pemikiran ekonomi liberal di Seskoad mendorong terjadinya perubahan rezim serta orientasi pembangunan yang kapitalis.

Pola relasi yang cenderung konfrontatif dengan dunia Barat mulai disikapi secara moderat oleh rezim Orde Baru. Perundingan dengan kekuatan ekonomi politik Barat segera dirintis. Kebutuhan untuk memperoleh bantuan ekonomi diselesaikan dengan pembentukan lembaga donor yang khusus akan membantu Indonesia, yaitu IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia) pada tahun 1967. Posisi tawar yang lemah rezim Orde Baru dimanfaatkan oleh kekuatan ekonomi politik internasional sebagai

media memaksakan kehendaknya dalam mengeksploitasi Indonesia. Sejak era tersebut kekuatan ekonomi domestik yang berkolusi dengan penguasa politik yang berubah dari “Ali Baba” menjadi “Baba-Ali” dan makin besar pengaruhnya dalam perjalanan sejarah politik bangsa Indonesia. ternyata kedaulatan di masa Orde Baru hingga Reformasi tidak menjadi lebih baik

Kedaulatan bangsa Indonesia mengalami kemerosotan tanpa disadari secara serius oleh para elite yang sedang berkuasa. Proses pelapukan kedaulatan bangsa sebenarnya dapat ditelusur dari awal Orde Baru. Kebijakan Orde Baru yang mengundang masuknya modal asing dalam pembangunan tanpa sikap kewaspadaan yang cukup banyak menimbulkan masalah serius namun seringkali bersikap misterius.

Tatanan ekonomi liberal yang disetujui Barat tetap toleran dengan pemerintahan yang otoritarian agar arus investasi dapat dijamin keselamatannya. Budaya feodal dapat bertahan bersamaan dengan sifat negara yang otoritarian dalam menjalankan ekonomi kapitalis. Konsekuensinya proses pembentukan karakter bangsa yang belum berhasil memberi ruang tumbuhnya mental bangsa yang lembek. Lemahnya budaya bangsa, terutama terhadap dimensi moral politik menimbulkan mental hipokrit, enggan bertanggungjawab, berwatak lemah, mental trabas dan lain-lain menyuburkan budaya korupsi dan kleptokrasi dan menghambat berkembangnya budaya meritokrasi (Lubis, 1981; Koentjaraningrat, 1985). Sifat tersebut menyebabkan bangsa Indonesia menjadi “bangsa lembek” dan permisif terhadap sikap dan perilaku yang kurang positif.

Para teknokrat (sebagian besar para ekonom dari UI dibawah pimpinan Widjojo Nitisastro) yang kebanyakan penganut ekonomi liberal mulai mengundang konsultan asing untuk membangun Indonesia ke depan. Pimpinan AD merasa cocok bekerjasama dengan negara kapitalis dibanding negara-negara sosialis. Berkolaborasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) mulai diterapkan program stabilisasi ekonomi yang drastic (shock-treatment approach) agar memperoleh pengakuan tanda layak untuk memperoleh kredit dari masyarakat ekonomi internasional. (Mas’oed, 1989; 62)

Didorong oleh para pakar ekonomi yang berhaluan liberal dicarikan payung hukum Tap MPRS no. XXIII/1966 tentang “Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan”. Mereka berargumen bahwa untuk memperoleh dukungan masyarakat bisnis internasional, pemerintah Indonesia dalam membangun ekonomi harus membolehkan penetrasi modal asing dan mengintegrasikan system perekonomian Indonesia menjadi bagian dari ekonomi dunia, yakni sistem kapitalis. Sejak itu arus modal asing mengalir cukup deras ke Indonesia.

Peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Orde Baru yang pertama adalah UU penanaman modal asing (UU no 1 tahun 1967). Dalam UU ini pemerintah menyebutkan adanya insentif yang diberikan pada investor asing, antara lain;

1. Pembebasan pajak terhadap keuntungan perusahaan sampai enam tahun bagi proyek-proyek yang diutamakan. Tax holiday ini kemudian dapat diperpanjang oleh pemerintah.
2. Pembebasan dari pajak dividen untuk periode yang sama.
3. Pembebasan dari pajak material modal pada saat mulai investasi modal asing.
4. Pembebasan dari bea masuk impor untuk peralatan, mesin, alat-alat dan kebutuhan-kebutuhan awal pabrik.

5. Pembebasan dari pajak harta benda.

6. Hak menstransfer keuntungan yang sedang berlangsung dalam mata uang asal.

Kelemahan pemerintah Orde Baru dalam berhadapan dengan kekuatan politik ekonomi asing, tidak hanya masih belum terkonsolidasinya kekuasaan politik, melainkan juga sampai masalah teknis dan integritas dari tokoh-tokoh pentingnya. Salah satu contoh yang diakui oleh ekonom Prof. Sadli yang pada waktu itu menjadi anggota tim penasehat ekonomi Presiden Soeharto dan tahun 1971 diangkat sebagai menteri Energi.

“...Ketika kami mulai berusaha menarik investasi modal asing dalam 1967, segala sesuatunya dan setiap orang kami sambut dengan tangan terbuka. Kami tidak berani menolak; kami bahkan tidak berani menanyakan bonafiditas surat-surat kepercayaan mereka. Kami membutuhkan satu daftar nama-nama dan angka- angka dollar yang hendak ditanamkan, untuk memberi kepercayaan kepada usaha kami. Perusahaan pertambangan yang pertama boleh dikatakan telah menetapkan sendiri persyaratan-persyaratannya. Oleh karena kami belum mempunyai konsep mengenai kontrak pertambangan, maka kami terima saja rancangan yang telah ditulis oleh perusahaan itu sebagai landasan perundingan, dan pedoman kami hanyalah akal sehat dan keinginan untuk menandatangani kontrak yang pertama. Hingga kini kami tidak menyesal. (Palmer dalam Muhaimin, 1991; 62).

Proses pembangunan Orde Baru menciptakan perubahan signifikan termasuk dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebutuhan pangan masyarakat relatif segera terpenuhi. Tingkat inflasi segera dapat dikendalikan. Kalangan pengusaha pribumi yang tidak memiliki jaringan, khususnya dengan jajaran militer sulit berkembang. Sebaliknya pengusaha keturunan Cina sebagai kelas menengah berkembang secara signifikan. Pengusaha yang mengalami perkembangan pesat adalah pengusaha pemburu rente yang memiliki jaringan kolusi dengan jajaran penguasa maupun pengusaha birokrat.

Sebaliknya karena pengelolaan ekonomi tidak mendasarkan pada kompetensi yang profesional banyak terjadi mismanagement. Beberapa perusahaan yang dikelola oleh jajaran militer AD mengalami kerugian yang besar akibat tata kelola yang tidak profesional. Tiga perusahaan yang terkenal dan mengelola modal besar di awal Orde Baru dan kemudian menimbulkan kerugian negara yang cukup besar adalah Pertamina yang dipimpin oleh Ibnu Sutowo, Bulog yang dipimpin oleh Achmat Tirtosudiro dan PT Berdikari yang dipimpin oleh Suhardiman (Crouch, 1993; 275-282).

Perusahaan Negara Cenderung Dijadikan “Sapi Perah” Oknum Penguasa

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan tidak dijalankan secara profesional. Akibatnya misinya untuk membantu mengatasi kesejahteraan masyarakat luas sekaligus mengimbangi pelaku usaha swasta tidak terjadi. Banyak perusahaan negara yang pailit dan menjadi beban keuangan negara.

Keterpurukan BUMN kemudian dijadikan alasan pemerintah untuk melakukan swastanisasi secara perlahan dengan rasionalisasi akademis yang sudah dipesan. Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi.

Transformasi kelembagaan BUMN mulai digulirkan. Status badan hukum BUMN ditransformasi dari perusahaan jawatan (perjan), menjadi perusahaan umum (perum) kemudian menjadi perusahaan perseroan (persero). Pimpinan BUMN cenderung berlomba mengubah menjadi persero agar memperoleh kebebasan mengelola.

Integritas dan kredibilitas mayoritas penguasa dan pengusaha Indonesia yang lembek tidak hanya menyebabkan perekonomian tidak dapat ditangani secara profesional, melainkan juga mudah terjebak oleh permainan kekuatan politik ekonomi asing. Salah seorang mantan pengusaha yang pernah melakukan penipuan terhadap Indonesia, John Perkins menyatakan bahwa;

“Bunga utang plus utang jangka pendek Indonesia sebagai persentase cadangan luar negeri, rata-rata melonjak nyaris 300 persen selama 1990-96... Sudah jelas kami membebani utang yang jumlahnya begitu mencengangkan hingga negara ini tidak mampu melunasi. Maka Indonesia dipaksa menebus utang dengan memuaskan hasrat korporasi kami. Dengan begitu, tujuan kami, para Bandit Ekonomi tercapai” (Perkins, 2007: 34).

Di awal reformasi BUMN yang sudah menjadi persero lebih mudah menjadi sasaran IMF untuk mendesak pemerintah RI segera melakukan privatisasi BUMN. Beberapa perusahaan negara dijual dengan harga murah. Tidak berlebihan kalau ekonom Revisond Baswir (2003; 209-11) menyebutnya dengan istilah *“rampokisasi BUMN”*. Perkembangan kalangan borjuasi nasional di Indonesia tidak dilandasi oleh etika bisnis sebagaimana nilai-nilai borjuis di awal revolusi Industri. Kedisiplinan, kerja keras, menjaga mutu dan suka menabung sebagai nilai kalangan borjuis Eropa kurang nampak dalam etos kerja kalangan borjuis Indonesia. Mereka cenderung mengandalkan bisnisnya pada kolusi untuk mengejar *“rente”*. Di Indonesia yang muncul adalah kapitalisme semu, apa yang oleh Yoshihara Kunio (1990) disebut *ersatz capitalism*.

Banyak pengusaha besar di Indonesia yang berjiwa kerdil. Dalam melipatgandakan modal yang dimiliki tidak mendasarkan unsur kejujuran, kerja keras dan kreativitas. Mereka sering mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan usaha lebih didasarkan pada relasinya dengan penguasa. Relasi pengusaha dan penguasa itulah yang menyuburkan praktek korupsi. Beberapa oknum pengusaha berjiwa kerdil tidak ragu menggunakan cara yang licik dan kejam. Mereka tidak ragu mengorbankan kedaulatan rakyat, kedaulatan negara selama kepentingan diri dan kelompoknya tercapai. Kewenangan negara dijadikan alat untuk melakukan intimidasi dan eksploitasi rakyat dengan memanfaatkan militer sebagai alat teror. Negara Orde Baru sangat tegas dan keras terhadap rakyat kebanyakan, tetapi sangat santun dan penurut terhadap kekuatan politik ekonomi global (Hariyono, 2008).

Tatkala tatanan politik ekonomi global sedang mengalami perubahan mendasar kelompok dominan di Indonesia tidak segera melakukan penyesuaian. Sejak paroh kedua tahun 1980-an tatanan global lebih menekankan pada wacana demokrasi dan HAM tidak disikapi secara cerdas. Tatanan kapitalis dunia yang sebelumnya toleran dengan feodalisme tidak disikapi secara lugas.

Pemerintah Orde Baru justru memberi *“hak istimewa”* pada keluarga istana untuk mengelola dunia pertambangan, tata niaga cengkeh, jeruk, jalan tol, *“mobil Nasional”* Timor dan sebagainya. Konsekuensinya kekuatan politik ekonomi global menganggap

hal tersebut sebagai suatu “distorsi pasar bebas”. Usaha memberi “hukuman” pada pemerintah Orde Baru mulai dijalankan.

Pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi oleh pemerintah sering mendapat perhatian dunia internasional. Banyak penyandang dunia internasional yang mendukung aktivitas LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Usaha integrasi Timor-Timur yang sebelumnya mendapat dukungan Barat juga dijadikan alat politik Barat menekan pemerintah Indonesia.

(Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan dengan IMF disaksikan Michel Camdessus, TEMPO Edisi Khusus 10 Tahun Krisis Ekonomi 23-29 Juli 2007, hlm. 26.)Ketergantungan pada asing yang rentan mencapai klimaknya ketika di Korea dan Malaysia terjadi krisis moneter. Posisi pemerintah Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto mengalami banyak kesulitan mengatasi “*krisis moneter*” yang telah berubah menjadi “*krisis multidimensional*”. Presiden selaku kepala pemerintahan Indonesia dipaksa untuk menandatangani agenda kekuatan politik internasional yang diwakili oleh IMF. Mundurnya Presiden Soeharto yang memunculkan pelbagai faksi kekuasaan makin memperlemah posisi Indonesia dalam bernegosiasi dengan kekuatan asing.

Kedaulatan rakyat menjurus pada kebebasan rakyat yang tidak diikuti oleh tanggungjawab. Terjadi ambiguitas dalam memaknai kemerdekaan, kedaulatan dan kebebasan. Masyarakat tidak hanya anti kebijakan pemerintah melainkan juga sering mengidentikan pemerintah Orde Baru dengan negara. Wacana “anti negara” makin menguat. Mereka tidak hanya benci terhadap Presiden Soeharto dan TNI melainkan mereka juga alergi dengan ideologi dan konstitusi negara. Suasana tersebut terjadi bersamaan dengan makin menguatnya wacana neoliberal yang berusaha mengurangi peran negara.

Era reformasi yang banyak memberi kebebasan pada awalnya memberikan suatu harapan yang besar bagi masyarakat. Dibuai oleh wacana pasar bebas, perdagangan bebas, pajak yang rendah, privatisasi dan deregulasi masyarakat dan pemerintah member kesempatan pada para pedagang (lokal dan internasional) bergerak bebas mencari keuntungan. Mereka yang menghalangi dianggap sebagai musuh peradaban. Negara yang tidak mendukung kebebasan pun dianggap melanggar “*Washington Consensus*”. Konsekuensinya seiring berjalannya sejarah, kedaulatan diri, bangsa dan negara justru makin memprihatinkan. Kita terasa menjadi bangsa yang makin “*lembek*”.

Eksplorasi dan Eksploitasi Kekayaan Alam Indonesia Makin Bersifat Masif.

Pemikiran ekonom Indonesia yang dominan di era reformasi masih didominasi oleh pemikir penganut neoklasik. Usaha mencari pinjaman untuk menopang pembangunan sekaligus mengurangi peran negara makin berjalan cepat. Pada era reformasi usaha mencari pinjaman makin bersemangat. Proses penjualan aset negara makin gencar dan meriah dipasarkan. Usaha mengurangi peran negara juga makin meningkat. Pelbagai kebijakan sejak Presiden Habibie (Golkar), Abdurahman Wahid (PKB), Megawati Sukarnoputri (PDI-P), hingga Susilo Bambang Yudoyono (PD) banyak yang memberi ruang keterlibatan swasta asing.

Menguatnya kebijakan neoliberal di era reformasi yang sulit dikendalikan oleh Presiden menurut Kwik Kian Gie (2003) disebabkan oleh “kecerdikan” ekonomi penganut ideologi neoliberal. Pada masa pemerintahan Abdurahman mereka masuk

pada badan penasehat atau tim asistensi. Pada masa pemerintahan Megawati mereka mengendalikan eselon I dan II dari semua departemen secara rapi.

Secara teoretis posisi pemimpin yang lebih mengandalkan kepentingan modal asing dan kurang peduli dengan nasib rakyat, sebenarnya sudah lama diungkap dalam "teori ketergantungan" yang di Indonesia dipelopori oleh Adi Sasono, Sritua Arief dan Arief Budiman. Dan yang relatif baru dikembangkan oleh Noreena Hertz bahwa para pemimpin politik di sebagian besar dunia dipilih oleh rakyat. Mayoritas pemimpin dipilih oleh rakyat sebagai bagian dari demokratis prosedural. Tetapi demikian mereka menempati posisinya justru akan "melayani" pelaku bisnis global yang tidak memilihnya.

Mereka yang tidak mau melayani akan mengalami kesulitan karena dengan mudah para kapitalis global akan menarik investasi yang dapat menyebabkan krisis moneter dan ekonomi. Konsekuensinya para pemimpin politik, khususnya di negara-negara berkembang cenderung berperan sebagai "salesman" yang menawarkan potensi ekonomi pada pengusaha besar dunia. Terjadilah proses menjual negara pada kapitalis global (Wibowo, 2010a).

Untuk itu melemahnya kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yang terjadi di era reformasi bukan akibat sosok presiden semata. Selain ada kekuatan ideology neoliberalisme yang sudah kuat adalah desakan IMF melalui LoI yang sudah ditandatangani oleh Presiden Soeharto di akhir kekuasaannya dan kemudian mengalami beberapa revisi (yang makin kurang menguntungkan Indonesia). Posisi kekuatan politik ekonomi internasional makin leluasa karena adanya kekuatan domestik (ekonom, politisi dan akademisi) yang pro pada kekuatan kapitalis global.

Biasanya mereka yang mendukung kebijakan pro kepentingan asing, yaitu sebagai "komprador" adalah mereka yang tidak memiliki kedaulatan diri yang positif. Konsekuensinya mereka sulit menjadi teladan bagi masyarakat kebanyakan. Gaya hidup mereka yang perlehte dan bergelimang kemewahan dipersepsikan sebagai suatu kewajaran. Wajar kalau kritik dari ketua KPK Busyro Muqoddas dalam pidato kebudayaan di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki terhadap pejabat negara yang konsumtif dan hedonis akibat berkembangnya "moralitas kumuh" (kompas, 12 November 2011) mendapat perlawanan dari beberapa pejabat politik. Para elit politik tidak hanya secara teknis berusaha memenuhi kepentingan pasar, melainkan secara kejiwaan telah memosisikan dirinya sebagai bagian dari "komoditi pasar" yang harus tampil dengan "penuh kemasan" layaknya "hukum jual beli".

Bukti-bukti sejarah kontemporer membuktikan bahwa ruang publik kini dikuasai oleh pasar. Komodifikasi pelbagai relasi kewargaan telah terjadi dimana-mana. Proses pemilihan umum untuk kepala daerah, presiden dan wakil presiden serta legislatif dimensi virtue, kebijakan makin tersisih. Pertimbangan pragmatis dan transaksional menyebabkan hasil pemilihan umum sebagai bagian dari proses demokrasi tidak selalu menghasilkan sirkulasi elit yang lebih profesional, transformatif serta mengutamakan kepentingan publik.

Meminjam konsep Mancur Olson, di era reformasi kesejahteraan rakyat sulit dicapai akibat telah terjadi metamorfosis elit yang menjadi "bandit". Elit politik di masa Orde Baru yang menjadi bandit cukup banyak, Namun mereka bagaikan bandit menetap (*stationary bandits*) sehingga tidak mengeksploitasi masyarakat secara maksimal.

Sebaliknya di masa reformasi para elit bagikan bandit berkeliaran (roving bandits) yang menguras habis potensi yang ada menyamping masih berkuasa. Konsekuensinya, pola kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) justru terjadi lebih banal di era reformasi (Wibowo, 2010b).

Biaya politik yang makin besar dalam proses politik telah menggerus konsep dan praktek kedaulatan rakyat. Amerika yang sering menjadi acuan penerapan demokrasi pun kini mengeluh dan prihatin dengan biaya politik yang cukup tinggi. Ekonomi pasar yang telah lama lebih mengandalkan privatisasi dan sempat dijadikan dianggap sebagai satu-satunya ideologi yang dapat bertahan pasca perang dingin kini banyak menghadapi masalah. Defisit anggaran Amerika akibat bangkrutnya perusahaan keuangan swastamembawa dampak yang besar bagi ekonomi Amerika secara keseluruhan. Negara yang sebelumnya dibatasi untuk terlibat dalam masalah ekonomi akhirnya harus turun tangan untuk ikut mengatasinya. Sebaliknya beberapa negara yang menempatkan negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi seperti Cina, India dan Brasil justru mengalami perkembangan ekonomi yang baik (Bremmer, 2010).

Makin meningkatnya hutang Indonesia serta masih terus berjalannya proses privatisasi perlu direnungkan kembali. Kita semua sebagai bangsa memang ingin menggapai kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Namun upaya pembangunan yang terlalu mengandalkan hutang luar negeri cukup rentan bagi masa depan. Bangsa Indonesia pada tahun 1988 telah mengalami suasana yang menyedihkan. Presiden Soeharto dipaksa bertekuk lutut oleh IMF yang diwakili Camdessus untuk menandatangani Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Letter of Intent (LoI). Ironisnya pada tahun 1999 Indonesia sudah tidak mampu lagi membayar cicilan pokok yang jatuh tempo. Tahun 2000 terjadi lagi. Dan tahun 2002 kembali terjadi. Konsekuensinya perlu diadakan penjadwalan hutang. Hutang Indonesia makin membengkak (Gie, 2003).

Pemerintah di era reformasi masih meneruskan penyelesaian anggaran dengan cara hutang, kecanduan hutang (debt-addict). Sampai bulan Maret 2010 hutang Indonesia mencapai 180,7 miliar dollar AS atau setara dengan Rp. 1.628, 4 triliun. Konsekuensinya IMF dan Bank Dunia dan WTO makin mudah mendikte kebijakan pembangunan di Indonesia. Banyak regulasi mulai UU hingga PP yang dipengaruhi oleh korporasi internasional, misal UU Migas "dipesan" bank dunia, UU BUMN "dipesan" Price Waterhouse Cooper, UU Kelistrikan "dipesan" ADB (Rais, 2008:214). Lebih memperhatikan lagi, sebagaimana diungkap oleh ketua MK, bahwa praktek "jual beli" pasal sering terjadi pada jajaran DPR yang kompetensinya terbatas dan integritasnya rendah. Kontrak karya dalam bidang pertambangan jadi tidak

Ironisnya ketika salah satu pelaku usaha, yaitu John Perkins, yang ikut terlibat dalam menciptakan jebakan hutang sudah tobat dan mengaku, namun elit dan pengambil kebijakan di Indonesia belum sadar dan tidak (mau) tahu. Para ekonom dan pengambil kebijakan seolah tidak tahu bahwa negara yang tidak campur tangan dalam bidang ekonomi pada saat mengami krisis menghadapi kesulitan yang luar biasa. Negara Amerika, Yunani dan Portugal yang sejak dua tahun terakhir mengalami kesulitan keuangan dapat menjadi contoh menarik. Sebaliknya negara-negara yang tetap berperan dalam bidang ekonomi dengan melakukan manajemen yang baik, yaitu India, China dan Brasil justru berhasil melakukan pembangunan lebih baik (Naisbhit, 2008).

Keterpukauan yang berlebihan terhadap wacana dan produk asing perlu disikapi dengan kritis. Wacana bukanlah sesuatu yang netral dan berada dalam ruang kosong. Setiap wacana selalu sarat dengan nilai dan kepentingan tertentu. Wacana Barat yang dikembangkan di negara-negara berkembang tidak selalu cocok dan berdampak positif terhadap dinamika masyarakat di negara berkembang (Said, 1994). Kita perlu kritis karena “rekayasa gagasan” (memetic engineering) selalu dimulai untuk melakukan hegemoni.

Kedaulatan bangsa Indonesia kini makin memprihatinkan. Banyak aset ekonomi yang sudah terlanjur dikuasai asing. Kebudayaan yang menjadi modal dasar dan kebanggaan sering mengalami distorsi. Dalam kebijakan politik pemerintah masih kurang tegas. Penegakan hukum tidak berjalan dengan mendasarkan pada prinsip keadilan. Kebanggaan terhadap bangsa dan negara menjadi melemah. Sementara elit politik banyak yang sulit dijadikan teladan. Sebagian besar etos kerja dan komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat masih lemah. Wacana anti negara masih kuat sementara kalau ada kesulitan negara diminta terlibat.

Untungnya prestasi olahragawan Indonesia dalam Asean Games cukup menyenangkan, termasuk kesebelasan PSSI U23 sehingga dapat menjadi penglipurlara dan kebanggaan. Masih ada rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Juga masih banyak anak Indonesia yang rela belajar, bekerja untuk mencapai prestasi demi reputasi dan kebanggaannya pada Indonesia.

Sejarah Membuktikan Kedaulatan Harus Diperjuangkan

Narasi ringkas tentang sejarah perjalanan kedaulatan bangsa di Indonesia cukup menarik untuk dijadikan salah satu referensi dalam menjelaskan kondisi Indonesia saat ini. Namun beberapa kelemahan bagi bangsa Indonesia tadi bukan untuk diratapi. Sudah bukan waktunya kita pesimis dan mengeluh. Kita perlu segera mencari solusi, minimal untuk dalam tataran pribadi yaitu berusaha menjadi sosok warga negara Indonesia yang berdaulat. Manusia yang tidak larut pada pemenuhan “keinginan” melainkan lebih mendasarkan pada kebutuhan. Menggali potensi diri untuk menjaga “harga diri” melalui prestasi. Hidup bukan untuk mengeluh, melainkan harus siap berpeluh. Bukan waktunya lagi kita bertobang dagu karena tantangan zaman menuntut kita untuk menyingsingkan lengan baju.

Hasil kajian dan refleksi tersebut dapat menjadi salah satu referensi dalam menatap masa depan. Dinamika sejarah kedaulatan bangsa Indonesia cukup fluktuatif. Kita perlu melakukan reinterpretasi terhadap pengertian dan tugas sejarah politik pada khususnya dan sejarah pada umumnya.

Sejarah politik seyogyanya perlu dimaknai secara baru sesuai dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan riil di masyarakat. Pada satu sisi perkembangan pengertian sejarah politik menjadi lebih luas. Sejarah politik didefinisikan dengan sejarah kekuasaan (*history of power*). Makna kekuasaan juga mulai meluas. Kekuasaan tidak hanya terkait dengan pemerintah, negara atau peperangan. Kekuasaan tidak sebatas dimaknai sebagai suatu kata benda yang ada di tangan elit saja. Kini kekuasaan dimaknai berada dimana-mana (*power is omnipresent*). Rakyat biasa, kelompok yang terpinggirkan (*subaltern*) hingga mereka yang terkalahkan juga memiliki kekuasaan.

Pada masa lalu kekuasaan cenderung dikaitkan dengan konsep “*kekuasaan atas*” (*power over*) yang penuh dengan dominasi, eksploitasi dan hegemoni. Kini mulai berkembang konsep “*kekuasaan bersama*” (*power with*). Kekuasaan tidak hanya monopoli dan atau dikaitkan dengan elit sebagaimana terjadi dalam masyarakat tertutup.

Kekuasaan secara riil dan potensiil juga dimiliki dan diaktualisasikan oleh rakyat kebanyakan. Kekuasaan juga merembes serta mempengaruhi bidang diluar politik, mulai dari kehidupan ekonomi, budaya, bahasa hingga relasi dalam rumah tangga. Untuk itulah kajian tentang kedaulatan suatu negara tidak harus menegasi kedaulatan diri warga negara. Kedaulatan negara dapat tegak dan kokoh selama berakar dan ditopang oleh kehidupan kewarganegaraan yang memiliki otonomi diri.

Dalam rangka untuk menempatkan, memaknai dan merealisasikan kedaulatan di Indonesia, sejarah politik Indonesia dapat menjadi salah satu referensi. Kedaulatan sebagai kata kerja bukan sesuatu yang bersifat statis dan berada dalam ruang kosong, tabularasa. Fluktuasi pemaknaan kedaulatan sangat dipengaruhi oleh pelbagai relasi kekuatan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi. Wacana politik global tentang posisi dan peran negara yang dinamis serta peran kekuatan politik-ekonomi internasional mempunyai peran yang cukup signifikan. Perubahan tatanan politik ekonomi global serta dinamika sosiologis, antropologis dan ekonomis masyarakat ikut bertalindan dengan perubahan politik yang sedang berproses.

Untuk itulah perdebatan tentang konsep kedaulatan dan realisasinya tidak dapat dipahami secara tunggal. Agar interpretasi tidak menjadi liar dan merugikan kepentingan bangsa serta tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, kita dapat menggunakan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar sekaligus bingkai dalam memaknai dan merealisasikan kedaulatan bangsa. Pancasila yang akhir-akhir ini banyak menarik perhatian publik seyogyanya benar-benar dapat menjadi dasar negara yang sesungguhnya sekaligus cara pandang bangsa Indonesia, khususnya para elitnya. Peningkaran atau sikap abai terhadap Pancasila yang dilakukan oleh elit-elit strategis, khususnya elit politik dapat berdampak luar biasa dibanding sikap abai masyarakat kebanyakan. Kebijakan dan regulasi yang mengatur mekanisme kehidupan berbangsa dan bernegara berpengaruh secara signifikan terhadap aktualisasi dan pengamalan Pancasila.

Pelbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh elit dan pengambil kebijakan sangat mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat. Pada saat pemerintah membiarkan importir memasukkan garam di tengah petani garam sedang panen raya membuat petani garam frustrasi dan kehilangan antusias memproduksi garam. Demikian halnya sikap pemerintah yang membuka peluang kembali impor sapi menyebabkan peternak sapi kehilangan gairah beternak sapi. Sebaliknya ketika gubernur Jawa Timur membuat surat edaran yang berisi himbauan agar pegawai negeri pada hari-hari tertentu menggunakan batik, gairah produksi batik makin meningkat. Sebagian besar masyarakat tidak merasa malu atau rendah diri memakai busana batik. Demikian pula tradisi setelah sidang pengukuhan guru besar sejak masa kepemimpinan rektor UM Prof. Dr. Suparno yang menyajikan masakan tradisional semacam “*tewul*”, “*gatot*” atau yang lain mampu membuktikan bahwa makanan tradisional tidak kalah lezat dan bergengsi dengan makanan impor. Pejabat universitas dan guru besar jadi tidak “alergi” makan “*tewul*” dan “*gatot*”.

Memujudkan Misi dan Visi Pendiri bangsa

Uraian tentang dinamika perjalanan sejarah bangsa Indonesia kontemporer di atas memang banyak menunjukkan kekurangan sigapan bangsa Indonesia dalam merealisasikan kedaulatan politik, ekonomi dan budaya. Dominasi kebijakan yang pro pasar di era globalisasi kurang memberikan keuntungan riil bagi bangsa dan negara Indonesia. Para pendiri bangsa jelas imperialisme, kolonialisme, kapitalisme dan feodalisme yang membelenggu kedaulatan diri rakyat maupun negara. Soekarno dan Hatta adalah sosok pejuang yang menginginkan Indonesia kedaulatan bangsa dan negara secara holistik. Hatta dalam pledoinya di pengadilan Belanda secara tegas menyatakan bahwa "lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain". Dan Soekarno dalam bukunya Indonesia pledoinya "*Indonesia Menggugat*" secara tegas menyatakan bahwa Kemerdekaan Nasional tidak berarti menjadi negeri mandat, daerah pengaruh.

Kita sebagai civitas akademik maupun warga negara memang bisa prihatin, namun sebagai pribadi kita perlu tetap optimis dan percaya diri. Kedaulatan diri dan bangsa Indonesia masih dapat dikembangkan untuk mencapai masyarakat yang cerdas, sejahtera, adil dan beradab. Kita harus tetap memiliki harapan sebagai sumber dan gairah dalam berjuang. Salah satu sarana untuk mengkajinya adalah membahas kedaulatan bangsadalama konteks historis. Sebelum kedatangan bangsa Barat, bangsa-bangsa di nusantara memiliki kedaulatan yang gemilang. Demikian pula pada masa pergerakan nasional, para pendiri bangsa memiliki pemikiran dan prinsip hidup yang layak menjadi teladan.

Suramnya kedaulatan diri dan bangsa saat ini bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Perkembangan modal asing yang masuk ke Indonesia sejak Orde Baru pada awalnya (minimal secara formal) ingin dijadikan sebagai stimulan pembangunan. Akibat pengelolaan pembangunan yang kurang waspada dan hati-hati menyebabkan modal asing mendominasi. Modal asing sering menimbulkan kerugian bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Apalagi setelah membaca pengakuan mantan bandit ekonomi John Perkins (2005, 2007) yang mengutarakan secara terbuka akan perbuatan pengusaha asing dalam mengeruk kekayaan Indonesia dengan meninabobokkan elit dan bangsa Indonesia. Ironisnya kekuatan politik ekonomi global justru makin dominan di era reformasi. Pelbagai aset yang menguasai hajat hidup banyak dikuasai oleh modal asing.

Bahasa Indonesia Makin Tidak Konsisten Dijalankan Dalam Berbahasa.

Ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan untuk memahami dan merealisasi kedaulatan bangsa secara cerdas dan bijak. Pertama adalah memahami pergeseran makna kedaulatan serta praksis yang terjadi di Indonesia dari perspektif sejarah. Realitas kedaulatan yang berkembang saat ini tidak relevan lagi dilihat dari dimensi mitologi dan atau ideologi semata. Eksplanasi ilmiah yang kritis perlu menjadi rujukan utama dalam memahami realitas.

Kedua melakukan reorientasi terhadap proses pembangunan bangsa. Pembangunan tidak hanya diorientasikan untuk mengatasi kebutuhan kekinian melainkan lebih pada realisasi untuk mencapai kesejahteraan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Negara memang harus kuat. Tetapi itu tidak berarti bahwa ketika negara kuat kedaulatan rakyat harus dikebiri. Pandangan dikotomis yang

mempertentangkan negara dan rakyat perlu dievaluasi. Berdirinya negara sejak awal dipahami untuk kesejahteraan rakyat bukan mengebiri hak-hak fundamental rakyat. Ketiga, menyikapi relasi politik ekonomi internasional di era globalisasi secara kritis dan bijak. Memang dari paparan sebelumnya nampak bahwa posisi bangsa Indonesia cenderung lemah dan sering dirugikan. Namun hal tersebut tidak harus disikapi dengan menerapkan politik isolasi atau menentang Barat secara frontal dan vulgar.

Diperlukan strategi dan keberanian moral yang cerdas dalam mengantisipasi dominasi, eksploitasi dan hegemoni pasar global yang kini terjadi. Kita bisa jengkel, marah dan sakit hati melihat banyaknya sumber daya alam dan ekonomi Indonesia yang lebih banyak memberi keuntungan bangsa asing disbanding bangsa Indonesia sendiri. Tetapi, kita tidak harus bersikap anti asing.

Sebagaimana telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa, bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang inklusif bukan chauvinisme, atau jingoisme. Pelbagai aspek yang kini telah menjadi milik bangsa Indonesia banyak yang diambil dan diolah dari asing. Misalnya istilah Indonesia bukan suatu istilah yang asli ditemukan oleh bangsa Indonesia. Istilah "Indu-nesians" pertama kali digunakan oleh ilmuwan Inggris George Samuel Windsor Earl pada tahun 1850 sebagai istilah etnografis untuk menjelaskan ras Polinesia yang tinggal di Kepulauan Hindia. Istilah "*Indonesian*" terus digunakan oleh James Logan untuk menjelaskan kawasan geografis kepulauan di nusantara. Kemudian disusul oleh E.T Hamy, N.B. Denny, Willian Edward Maxwell dan Adolf Bastian sebelum dimaknai secara politik oleh tokoh-tokoh pergerakan pada akhir dasarwarsa kedua abad XX (Elson, 2008). Demikian pula istilah republik, demokrasi dan sebagainya.

Pelbagai aspek yang berasal dari asing oleh nenek moyang kita tidak diterima begitu saja melainkan diolah sesuai dengan potensi dan makna menjadi bagian dari proses akulturasi hingga "lokal genius". Kita masih perlu berelasi dengan bangsa-bangsa lain dalam membangun dunia yang lebih baik. Kedaulatan yang diperjuangkan bangsa Indonesia adalah kedaulatan yang dapat berdampingan dengan kedaulatan bangsa lain. Dalam konteks itulah nasionalisme Indonesia diharapkan tumbuh kembang secara sehat dalam "*tamansari internasionalisme*".

Memang upaya menegakkan kedaulatan dalam bidang politik, ekonomi dan budaya harus dilakukan secara silmultan dan holistik. Masing-masing bidang saling terkait dalam merealisasi kedaulatan. Langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan adalah melakukan "*revolusi budaya*". Kita perlu melakukan "*imaginasi kreatif*" terhadap nilai-nilai luhur peradaban bangsa secara cerdas. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa yang digali dari mutiara budaya Indonesia dapat menjadi titik tolak sekaligus tolok ukur dalam melakukan "*revolusi budaya*".

Melalui revolusi budaya diharapkan akan terjadi perubahan radikal terhadap cara hidup dan cara kerja (*way of life*), cetak pikir (*mindset*), nilai (*values*) dan cara pandang (*way of thinking*) serta ethos kerja. Melalui revolusi budaya bangsa Indonesia dapat bersama-sama berusaha dan berjuang mencapai kemerdekaan pikiran dan hati bangsa Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 "*Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita! Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita!*".

Usaha para pendiri bangsa bukan sekedar mencapai kedaulatan negara, melainkan juga kedaulatan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Untuk itulah Bung Hatta selalu mengingatkan akan pentingnya kedaulatan rakyat dalam bidang politik, ekonomi dan sosial agar bangsa Indonesia tidak terjebak pada tatanan kapitalisme yang menindas, baik kapitalisme dalam negeri maupun kapitalisme asing (Suleman, 2010).

Dalam bidang budaya kita perlu tegar dan percaya diri dengan nilai-nilai luhur yang kita warisi dari nenek moyang. Bahasa Indonesia sebagai bagian dari produk budaya sekaligus menjadi salah satu identitas utama bangsa Indonesia perlu kita aktualisasikan secara konsisten. Serangan bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia yang sempat menimbulkan istilah "Indogris" perlu segera diakhiri.

Dalam konteks itu, penulis mengusulkan agar bahasa pengantar, simbol dan identitas yang ada di lingkungan UM menggunakan prinsip bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau tidak baik dan tidak benar itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa bukan hanya cermin dari realitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Wittgenstein. Bahasa adalah cakrawala, batas pandangan dan pemahaman dunia seseorang sebagaimana dinyatakan oleh Bertrand Russel. Kehidupan manusia sulit dibayangkan tanpa bahasa yang teratur. Menurut Konfusius keteraturan hidup manusia diawali oleh bahasa. Tidak berlebihan kalau Derrida menyatakan bahwa dekonstruksi menempatkan bahasa lebih sebagai simbol (sign) dibanding sebagai kata (word). Sebagai simbol bahasa merupakan media utama dalam membaca ulang realitas sebagai suatu teks.

Hal ini perlu ditekankan karena masalah bahasa bukan sekedar masalah teknis tata bahasa. Bahasa merupakan identitas sekaligus bagian dari eksistensi dan aktualisasi bagi komunitas pendukungnya. Kedisiplinan dalam berbahasa merupakan cermin disiplin hidup sebagai bangsa. Konsistensi berbahasa secara baik dan benar menjadi bagian dari perbaikan dan pengembangan cara hidup suatu bangsa yang bertanggungjawab. Bahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari realisasi kesadaran eksistensial. Pada satu sisi bahasa Indonesia ingin dijadikan bahasa internasional, minimal sekarang telah menjadi bahasa resmi "ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly*" namun justru masih banyak elit dan rakyat Indonesia yang kurang percaya diri (Damshausser, dalam Tempo 20 November 2011).

Kedaulatan politik diharapkan tidak hanya dapat memberikan kebijakan yang tegas dan cerdas dalam aspek budaya, melainkan juga dalam aspek ekonomi. Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara harus menjadi dasar pertimbangan utama dalam membuat regulasi kehidupan berbangsa dan bernegara secara konsisten. Program kekuatan politik-ekonomi internasional yang ingin mencari keuntungan melalui intervensi dalam pelbagai regulasi, khususnya melalui Program Penyesuaian Struktural (*Structural Adjustment Program* (SAP)), perlu disikapi secara kritis dan cerdas. Banyak aturan hukum mulai dari UU sampai dengan PP yang tidak konsisten dengan Pancasila sehingga merugikan kepentingan bangsa Indonesia.

Potensi lokal yang ada perlu dikembangkan untuk menjadi pilar sekaligus dasar memenuhi kebutuhan sendiri. Baik dalam pemenuhan ketahanan pangan, energi, system politik, budaya hingga ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diintegrasikan dan disinergikan dengan sistem budaya yang ada. Misal, tanpa ada integrasi ilmu pengetahuan dengan kebudayaan yang ada akan memunculkan gejala disintegrasi antara pengetahuan ilmiah dengan sikap ilmiah. Ilmu pengetahuan di Barat sejak revolusi industri telah menciptakan deklerikalisasi. Sebaliknya di Indonesia budaya

baca tulis justru memperkuat klerikalisasi dengan menempatkan ilmu pengetahuan sebagai simbol inisiasi yang vulgar. Penggunaan gelar akademis dalam dunia non akademis, atau "belajar" hanya untuk memburu gelar adalah indikasinya. Proses "belajar" yang mudah, murah dan cepat telah menjadi salah satu budaya instan yang membahayakan landasan mental dan intelektual generasi Indonesia ke depan.

Sebagai bangsa yang cukup lama dijajah memang berpengaruh dengan cara piker dan bertindak kolektif. Rasa rendah diri dalam berinteraksi dengan bangsa lain perlu segera diubah. Kita sebagai bangsa perlu segera melakukan revolusi budaya yang mampu memberi sentakan kesadaran, yang memungkinkan terjadinya perubahan mental. Perubahan mental bangsa lembek menjadi mental dan budaya yang kuat dengan menanamkan kesadaran akan "*harga diri*". Tanpa harga diri sulit digapai prestasi. Tanpa prestasi tiada reputasi. Tanpa prestasi dan reputasi kedaulatan diri dan bangsa tidak dihormati dan kita hanya akan menjadi "*bangsa tempe*" yang mudah diinjak-injak oleh orang atau negara lain. Sejarah tidak ada yang berulang, tetapi manusia berulang kali tidak dapat belajar dan mengambil hikmah dari sejarah.

Catatan Akhir

Sebagaimana di awal telah disinggung bahwa sejarah sebagai suatu ilmu seyogyanya tidak berhenti menjadi ilmu yang konservatif. Ilmuwan sejarah seyogyanya tidak hanya rajin dan aktif mendiskripsikan peristiwa-peristiwa masa lampau. Sebagai ilmuwan yang memiliki tanggungjawab sekaligus menyadari diri sebagai pelaku sejarah perlu menjabarkan benang merah masa lalu dengan masa kini dan masa depan. Tawaran ilmu profetik yang dikemukakan oleh almarhum Kuntowijoyo menjadi salah satu alternatif yang cukup signifikan dalam melihat kondisi sejarah baik sebagai peristiwa, kisah maupun proses.

Masa lampau masyarakat di nusantara pernah gemilang. Di era pergerakan banyak melahirkan tokoh dan pemikiran cemerlang. Mereka berjuang tanpa kenal lelah menggapai kedaulatan bangsa dan negaranya. Sebelum bangsa dan negaranya berdaulat mereka telah berhasil melakukan lompatan eksistensial, yaitu menjadi sosok-sosok pribadi yang berdaulat. Namun setelah "kemerdekaan politik" diperoleh kedaulatan warga maupun negara dalam kancah kehidupan yang lebih luas masih memprihatinkan. Kebudayaan Indonesia masih masuk kategori budaya yang lembek, yaitu terlalu permisif terhadap sikap mental terabas, hipokrit, dan kurang menjaga kualitas, termasuk kualitas diri dan harga dirinya.

Agar dimensi profetik tidak membelenggu alternatif, posisi sejarah sebagai ilmu profetik perlu diposisikan juga sebagai ilmu kritis, yaitu ilmu yang selalu "curiga" terhadap apa yang sudah ada. Sebagaimana dikembangkan oleh Ardono, Horkheimer, Eric Fromm hingga Jurgen Habermas, ilmu sosial kritis memiliki karakteristik emansipatoris dengan anggapan bahwa tidak ada ilmu dan teknologi yang bersifat netral. Dengan menempatkan sejarah sebagai ilmu profetik dan kritis, deskripsi tentang masa lalu dapat dikembangkan sebagai suatu peristiwa sejarah yang terus bergerak dan berpengaruh hingga masa kini. Melalui proses perubahan dan kelanjutan yang cukup kompleks masyarakat diharapkan tidak hanya belajar sejarah melainkan juga berani memposisikan dirinya sebagai pelaku sejarah bukan sekedar obyek sejarah.

Kedaulatan yang di masa pergerakan nasional dirumuskan serta diperjuangkan secara cerdas justru mengalami kekaburan di masa setelah kemerdekaan. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan oleh situasi zaman. Pada masa kolonial seseorang, khususnya pelajar yang akan masuk dalam gelanggang politik akan berpikir panjang. Resiko dan tantangan yang berat menjadi media

seleksi mental dan intelektual. Sebaliknya di masa setelah kemerdekaan dan khususnya di era reformasi ini, dengan menggunakan "yargon" demokrasi seolah politik dapat dikerjakan oleh siapa saja. Mereka yang pernah terlibat dalam tindak kriminal dan kurang memiliki wawasan dan pengetahuan politik yang cukup pun merasa berhak menjadi politisi.

Kedaulatan diri dan kedaulatan bangsa yang kita jalani akhir-akhir ini perlu disikap dengan cara yang baru. "Gerakan *swadeshi*" yang sebelumnya ditafsirkan cinta produk dalam negeri perlu ditambah dengan milik bangsa sendiri, Terjadi paradoks antara gerakan perjuangan kedaulatan diri dengan kedaulatan negara. Gerakan anti Negara yang makin mengeras di era reformasi perlu disikap secara kritis dan cerdas (Winarno, 2010). Demikian pula sebaliknya gerakan yang mengutamakan perjuangan kedaulatan diri melalui hak asasi manusia juga perlu disikap secara kritis dan kreatif. Hal ini perlu dilakukan agar kepentingan nasional tidak dipersempit menjadi kepentingan penguasa dan hak asasi manusia dihadapkan secara diametral dengan kepentingan negara yang lebih luas.

Di masa lalu anak-anak nusantara pernah menjadi pelopor sekaligus pemegang obor peradaban. Kini para pemimpin dan rakyat Indonesia harus berani berdiri tegak sekaligus menegakkan harga diri dan kedaulatan diri secara terhormat dan bermartabat. Tanpa adanya komitmen, keberanian dan kecerdasan dalam berdiplomasi dengan bangsa asing, terutama negara-negara besar akan menyebabkan Indonesia hanya menjadi "Negara centeng" (Wibowo, 2010 a).

Bangsa Indonesia sebagai keturunan dan atau pewaris bumi nusantara juga bisa memperjuangkan kedaulatan diri, kedaulatan politik, ekonomi dan budaya, negara tercinta Indonesia raya. Bagaikan sebuah peribahasa bahwa, "ikan yang mati akan hanyut mengikuti arah arus mengalir. Sebaliknya ikan yang hidup akan berenang di tengah arus tanpa harus takut terhanyut". Bagaikan judul pidato bung Hatta di depan sidang KNIP tahun 1948, "bangsa Indonesia hanya dapat mempertahankan kedaulatan dengan cerdas kalau dapat menjadi nahkoda yang piawai Mendayung diantara Dua Karang". Bangsa Indonesia memang perlu mencermati perkembangan tatanan global. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah merajut dan mengembangkan potensi lokal.

Mengubah budaya bangsa yang lembek (*soft state*) menjadi budaya etos kerja yang ulung dan agung. Tanpa kemampuan menggali nilai-nilai budaya luhur dan merealisasikannya menjadi etos kerja yang ulung, bangsa Indonesia hanya akan menjadi halaman belakang (*backyard*) bangsa-bangsa Asia lainnya.

Melalui belajar dan kerja yang cerdas bangsa Indonesia pasti bisa menggapai kejayaan dan menegakkan kedaulatan diri dan bangsa secara gemilang. Kita sudah memiliki visi kenegaraan yang cerdas yaitu Pancasila (Latif, 2011) tetapi mengapa kita silau dengan alamat yang ingin dicapai bangsa asing? Penulis khawatir mungkin itu hanyalah "alamat palsu" dalam mencapai kesejahteraan rakyat sebagaimana lagu yang dinyanyikan Ayu Ting Ting? Indegenisasi teori pembangunan dan teori keilmuan dibutuhkan agar epistemologi ilmu dapat bersinergi dengan sosiologi ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan masalah bangsa yang mendsak dan strategis. Barangkali, pernyataan yang dikemukakan oleh Eko Fajar Nurprasetyo, pemuda yang mempelopori usaha industri semikonduktor yang meninggalkan kondisi pekerjaan yang mapan di Jepang demi melihat bangsanya maju patut dikutip. Dia menyadari bahwa identitas kebangsaan di era globalisasi masih sangat penting. Menurutnya "Sebuah bangsa semakin dihormati bangsa lain jika percaya pada nilai-nilai baik bangsa sendiri dibanding hanya mengekor pada kemajuan bangsa lain" (Kompas, 18 Oktober 2011).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. 1985. Pendahuluan: Sejarah dan Historiografi. Dalam Abdullah, T. & Surjomihardjo, A. Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arah dan Perspektif: Jakarta: YIIS & Leknas LIPI – Gramedia.
- Adam, C. 1966. Bung Karno; Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.
- Alam, W.T. 2009. Di Bawah Cengkeraman Asing. Jakarta: Ufuk Press.
- Alfian. 1999. Pengantar edisi Indonesia. Dalam Harry A. Poeze. Pergulatan menuju Republik, Tan Malaka 1925-1945. Jakarta: Grafiti Press.
- Anderson, B.A. 1972. "The Idea of Power in Javanese Culture". Dalam Claire Holt (Ed.). Culture and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
- Barnes, H.E. 1963. A History of Historical Writing. New York: Dover Publications, Inc.
- Baswir, R. 2003. Privatisasi BUMN: Menggugat Model Ekonomi Neoliberal IMF, dalam I. Wibowo & Francis Wahono. Neoliberalisme. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Bourcheir, D. & Legge, J. 1994. Democracy in Indonesia 1950s and 1990s. Victoria. Centre of Southeast Asian Studies.
- Bremmer, I. 2010. The End of The Free Market; Who Wins the War Between States and Corporations? New York: Penguin Group.
- Budiman, A. 1989. Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Conboy, K. & Morrison, J. 1999. Feet to the Fire; CIA Covert Operations in Indonesia 1957-1958. Annapolis: Naval Institute Press.
- Crouch, H. 1993. The Army and Politics in Indonesia. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Elson, R.E. 2009. The Idea of Indonesia, sejarah pemikiran dan gagasan. Terj. Zia Anshor. Jakarta: Serambi.
- Elton, G.R. 1970. Political History, Principles and Practice. New York: Basic Books, Inc.
- Feith, H. 1962. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
- Gibbons, M.T. ed. 1987. Tafsir Politik. Yogyakarta: Qalam.
- Gie, K.K. 2003. Membangun Kekuatan Nasional Untuk Kemandirian Bangsa. Dalam I. Wibowo & F. Wahono. Neoliberalisme. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Gilbert, F. 1990. History: Politics or Culture? Reflections on Ranke and Burckhardt. Princenton University Press.
- Habermas, J. 1990. Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi. Terj. Hassan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Harvey, D. 2010. Imperialisme; genealogi dan logika kapitalisme kontemporer. Yogyakarta: Resist Book.
- Hatta, M. 1982. Ke Arah Indonesia Merdeka. Dalam Miriam Budiardjo (ed.). Masalah Kenegaraan. Jakarta: Gramedia.
- 1983. Tanggungjawab Moral Kaum Inteligensia. Dalam Aswab Mahasin & Ismed Natsir (ed.) Cendekiawan dan Politik. Jakarta: LP3ES.
- Hariyono. 2004. Transisi Menuju Demokrasi Terpimpin, dalam Ismain, K. & Nurhadi. Sejarah dan Kebudayaan. Malang. Universitas Negeri Malang Press.
- 2006. Dinamika Anak-Anak Pergerakan dan Pemikiran Demokrasi. Dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Th. 40 No. 2.
- 2008a. Anak-anak Pergerakan dan Pencerahan Budaya Indonesia. Dalam Djoko Marihandono (ed.). Titik Balik Historiografi di Indonesia. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- 2008b. Penerapan Status Bahaya di Indonesia. Jakarta: Pencil 324.
- 2009. Blueprint Demokrasi menurut Pendiri Bangsa. Laporan Penelitian. Malang Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang.

- Kartodirdjo, S. 2005. *Sejak Indisch Sampai Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- Katoppo, A. 2000. *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, Sumitro Djojohadikusumo*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kleden, I. 1988. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- 2003. *Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia*. Jakarta: Kompas.
- 2004. *Masyarakat dan Negara, Sebuah Persoalan*. Magelang: Indonesiatera.
- Koentjaraningrat, 1985. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kunio, Y. 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Latif, Y. 2011. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, M. 1981. *Manusia Indonesia, Sebuah Pertanggungjawaban*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Madjid, N, 2004. *Indonesia Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mas'ood, M. 2006. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966 – 1971*. Jakarta: LP3ES.
- McCarthy, T. 2008. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- McVey, R. 1998. *Kaum Kapitalis Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhaimin, Y.A. 1991. *Bisnis dan Politik; Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES.
- Multatuli, 2008. *Max Havelaar*. Jakarta: Narasi.
- Muzaki, F.I. 2010. *Bahasa SBY dan Bahasa Indogris*. Surabaya. *Harian Surya*.
- 2011. *Kemerdekaan Bahasa Indonesia*. Surabaya: *Harian Surya*.
- Nagazumi, A. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908 – 1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Nasution, I & Agustinus, R. (Peny.). 2006. *Restorasi Pancasila, Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kampus FISIP UI, Depok, 31 Mei 2006.
- Niel, R. Van. 1984. *Munculnya Elit Modern*. Terj. Zahara D.N. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Nugroho, E. 2004. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Bekasi: PT Delta Pamungkas.
- Perkins, J. 2005. *Confessions of an Economic Hit Man*. Jakarta: Abdi Tandur.
- 2007. *Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional*. Jakarta: Ufuk Press.
- Poeze, H.A. 1999. *Pergulatan Menuju Republik Tan Malaka 1925-1945*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- 2008. *Di Negeri Penjajah, Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia-KITLV.
- Priyono, H.B. 2008. *Berburu Manusia Ekonomi*. Dalam Basis No. 01 Tahun ke-57.
- Purwanto, B. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*. Yogyakarta: Ombak.
- Rais, M.A. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!*. Yogyakarta: PPSK.
- Reid, A. 1993. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ricklefs, M.C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*. Jakarta: Serambi.
- Rivai, A. 2000. *Student Indonesia di Eropa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Riyanto, E.A. 2011. *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Said, E.W. 1994. *Culture and Imperialism*. London: Vintage.
- Senge, P.M. 2006. *The Fifth Discipline; The Art & Practice of the Learning Organization*. New York: Double Day.

- Shills, D.L. 1968. *International Encyclopedia of the Social Sciences*. New York: The Macmillan Company & The Free Press.
- Shindunata, 2008. Masyaallah krisis tempe. Dalam "Basis" Edisi Januari-Februari 2008.
- Shiraishi, T. 1997. *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Rej. Hilmar Farid. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Simbolon, P.T. 1995. *Akar-Akar Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sukarno, 2005. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Suleman, Z. 2010. *Demokrasi untuk Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- Suseno, F. M. 2004. *Etika Politik, Prinsip- prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- van Leur, J.C. 1960. *Indonesian Trade and Society*. Bandung: Sumur Bandung.
- van Miert, H. 2003. *Dengan semangat Berkobar, Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930*. Terj. Sudewa Satiman. Jakarta: Hasta Mitra: Pustaka Utan Kayu.
- Vlekke, B.H. 2008. *Nusantara, Sejarah Indonesia*. Terj. Samsudin Berlian. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wardaya, B.T. 2006. *Bung Karno Menggugat*. Jakarta: Gramedia.
- Wibowo, I 2010. *Negara Centeng; Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- 2010b. *Negara dan Bandit Demokrasi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Wie, T.K. 2002. *Kebijakan Ekonomi di Indonesia selama Periode 1950-1965 Khususnya dalam Investasi Asing*. Dalam J. Thomas Linblad; *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM – Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. 2010. *Melawan Gurita Neoliberalisme*. Jakarta: Erlangga.
- Winters, J.A. 2004. *Orba Jatuh, Orba Bertahan, Analisa Ekonomi – Politik 1998 – 2004*. Jakarta: Djambatan.